

SKRIPSI

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DI KOTA BANDA ACEH
BERDASARKAN METODE TIPOLOGI KLASSEN DAN
SHIFT-SHARE**



Disusun Oleh:

**MUAMMAR
NIM. 170604038**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muammar
NIM : 170604038
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan penipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya dan telah memiliki pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



Muammar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode
Tipologi Klassen dan Shift-Share**

Disusun Oleh

Muammar

NIM. 170604038

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801


Safarul Afa, SE., M.Si
NIDN. 1318128701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


AR - RANIRY

Dr. Muhammad Adnan SE., M.Si
NIP. 19720428 199903 1005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode
Tipologi Klassen dan Shift-Share**

Muammar
NIM. 170604038

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 July 2021
5 Zulhijah 1442 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

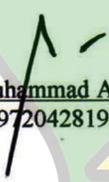
Ketua


Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si
NIDN. 0126037801

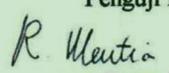
Sekretaris


Safarul Aulfa, SE., M.Si
NIDN. 1318128701

Penguji I,


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II,


Rachmi Meutia, M.Sc
NIP. 198803192019032013

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, MAH
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muammar

NIM : 170604038

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi

E-mail : ammaralhady20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Tipologi
Klassen dan Shift-Share**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 16 Januari 2019

Mengetahui,

Penulis

Muammar
NIM. 170604038

Pembimbing I

Dr. Istifan Njimi, SE.,M.Si
NIDN. 0126037801

Pembimbing II

Safarul Afa, SE.,M.Si
NIDN. 1318128701

MOTTO PERSEMBAHAN

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. QS. Ali 'Imran Ayat 139

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289).

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua surgaku, Ayah dan Ibu serta Keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk menyandarkan keluh kesah. Untuk orang-orang yang kusayangi, dan untuk seluruh pejuang pendidikan yang akan menjadi Bapak generasi ummad dan Ibu peradaban.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturanNya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Tipologi Klassen dan Shift-Share”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan Ribuan terimakasih kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., M.M selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku Asisten Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ilmu Ekonomi
4. Dr. Isthafan Najmi, SE., M.Si selaku pembimbing I dan bapak Safarul Aufa, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ungkapan terimakasih kepada Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku Penguji I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku penguji II
6. Dr. Hafas Furqani M.Ec. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis serta Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bpk Suriadi Puteh dan Ibu Lilis Suriani yang telah menjadi orang tua tersebut sejagat Raya, telah bersusah payah membesarkan dan merawat penulis serta tidak pernah merasa letih dan lelah dalam memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa kepada penulis baik itu materi maupun doa-doa terbaiknya. Semoga menjadi amal jariah yang tidak pernah putus untuk keduanya. Terimakasih juga buat Kakanda dan Adinda Penulis, Mustakim, Miftahul Jannah, Adek Fauzul Ajizi, Aiyup Sami dan Adinda

Syafika yang selalu memberikan Doa, motivasi serta kasih sayang yang tentu tidak akan bisa terbalaskan dengan apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat Waktu.

8. Sahabat suka-duka selama perkuliahan seluruh keluarga Almahira IEC. Tempat konsultasi dan bimbingan dari awal hingga akhir Bg Rama. Untuk sahabat terbaik Akmal, Rizki, Asran, Nisa, Ika, dan untuk segalanya. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik lainnya yang selalu mensupport hingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh 25 Juli 2021
Penulis,

Muammar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	فا	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	Fathah dan alifatauya	Ā
اِ / إِ	Kasrah dan ya	Ī
اُ / أُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h

ABSTRAK

Nama : Muammar
NIM : 170604038
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Analisis Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Metode Tipologi Klassen dan Shift-Share.
Pembimbing I : Dr. Isthafan Najmi,SE.,M.Si
Pembimbing II : Safarul Aufa SE.,M.Si
Kata Kunci : Sektor Unggulan, Typology Klassen, Shift share, Overlay, Banda Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten kota Banda Aceh serta mengetahui sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestic Bruto kota Banda Aceh. Sektor unggulan dapat ditentukan dengan menggabungkan beberapa alat analisis, seperti: Metode Tipologi Klassen, Shift Share dan Overlay. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kurun waktu, seperti PDRB Kabupaten Banda Aceh dan Provinsi Aceh dari tahun 2015 hingga 2020 berdasarkan harga dasar konstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Banda Aceh berdasarkan analisis gabungan dari tiga alat analisis terdapat tujuh sektor unggulan. Sektor Real Estate, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya, sektor pengadaan Listrik dan Gas serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang. Selanjutnya berdasarkan metode Tipologi Klassen dimana sektor yang memiliki pertumbuhan dan maju paling besar adalah sektor Administrasi Pemerinthan dengan sub-sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, disusul oleh sektor Real Estat,Jasa Pendidikan, Sektor jasa kesehatan dan Kegiatan sosial lainnya. Kelima sektor ini masuk dalam Kuadran I (Kategori kuadran dengan ekonomi sektor maju dan tumbuh dengan pesat). Sedangkan berdasarkan hasil analisis Shift-Share, ada lima sektor yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh yaitu: jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib,Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Kontruksi, Informasi dan Komunikasi, dan sektor Pendidikan.

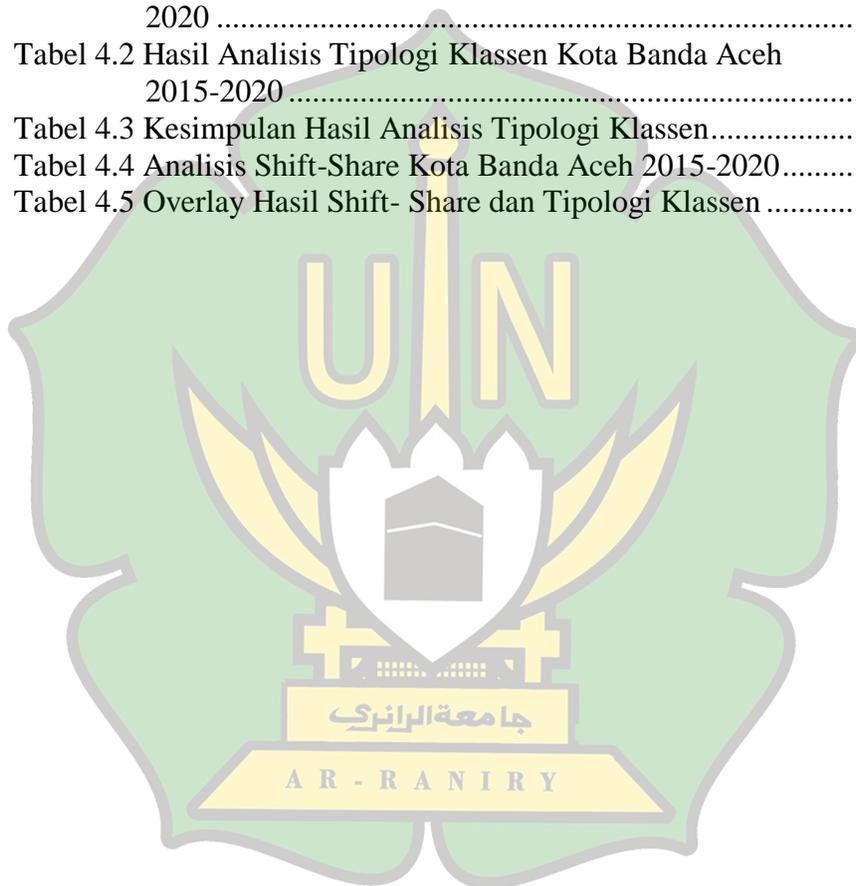
DAFTAR ISI

SAMPUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	Error! Bookn
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	Error! Bookn
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian Skripsi.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah	11
2.2 Teori Basis Ekonomi	20
2.3 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan	23
2.4 Pertumbuhan Ekonomi	27
2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	33
2.5 Konsep Sektor Unggulan	38
2.5.1 Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah.....	42
2.5.2 Analisis Tipologi Klassen	46
2.5.3 Metode S-S (Shift Share)	49
2.6 Penelitian Terdahulu	51
2.7 Kerangka Berpikir	58

BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Rancangan Penelitian.....	59
3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian	60
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	60
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	60
3.5 Definisi dan Operasional Variabel	61
3.5.1 Sektor Unggulan	61
3.5.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	62
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data.....	63
3.6.1 Analisis Tipologi Klassen	63
3.6.2 Analisis Shift Share.....	64
3.6.3 Analisis Overlay	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Gambaran Umum Deskripsi Penelitian.....	69
4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan	69
4.1.2 Wilayah Administrasi dan Ketenagakerjaan.....	72
4.2 Hasil Analisis Data	78
4.2.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen	78
4.2.2 Hasil Analisis Shift-Share	81
4.1.3 Analisis Overlay.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tipologi Klassen	48
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	55
Tabel 3.1 Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen	64
Tabel 4.1 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2020	73
Tabel 4.2 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Banda Aceh 2015-2020	79
Tabel 4.3 Kesimpulan Hasil Analisis Tipologi Klassen.....	80
Tabel 4.4 Analisis Shift-Share Kota Banda Aceh 2015-2020.....	81
Tabel 4.5 Overlay Hasil Shift- Share dan Tipologi Klassen	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	4
Gambar 4.1 Demografi Pemetaan Wilayah Kota Banda Aceh	Error! Bookn
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017-2020	Error! Bookn
Gambar 4.3 Kelompok Umur Penduduk Bekerja Kota Banda Aceh	Error! Bookn
Gambar 4.4 Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	Error! Bookn
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banda Aceh Menurut Lapangan.....	Error! Bookn
Gambar 4.6 Grafik Rata-rata Kontribusi Sektor unggulan terhadap PDRB Kota Banda Aceh 2015-2020	Error! Bookma
Gambar 4.7 Grafik Kontribusi Deferan Shift-Share (Dij) Sektor Ekonomi Kota Banda Aceh 2015-2020.....	Error! Bookn



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015-2020	101
Lampiran 2	PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah), 2015-2020	103
Lampiran 3	Laju Pertumbuhan Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2020	105
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Indek Harga Implisit PDRB Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	106
Lampiran 5	Indeks Harga implisit Regional Bruto Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	107
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas dasar Konstan Menurut Lapangan usaha 2016-2020	108
Lampiran 7	Distribusi Persentase Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) 2016-2020	109
Lampiran 8	PDRB Kota Banda Aceh atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2016-2020	110
Lampiran 9	Distribusi Persentase PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	111
Lampiran 10	PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Milyaran Rupiah)	112
Lampiran 11	Hasil Analisis Tipologi Klassen	113
Lampiran 12	Analisis Shift-Share	113
Lampiran 13	Luas Daerah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan	114
Lampiran 14	Realisasi Keuangan Kota Banda Aceh (Ribu Rupiah) 2018-2019	115

Lampiran 15	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Yang Ditamatkan, 2020 ..	116
Lampiran 16	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017-2020.....	117
Lampiran 17	Nama-nama Dinas/Kantor/Badan di Kota Banda Aceh.....	118
Lampiran 18	Banyaknya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Banda Aceh, 2020	119
Lampiran 19	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh atas dasar Harga Berlaku 2016-2020	120
Lampiran 20	Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri di Kota Banda Aceh, 2020	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat pasti bertujuan untuk hidup sejahtera dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya didunia. Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, penduduk negara tersebut dengan segala potensi yang tersedia melakukan upaya pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di negara-negara berkembang tahap awal dalam upaya pembangunan ekonomi diidentifikasi dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau strategi pertumbuhan ekonomi kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Analisis ini sangat penting guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan wilayah dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Hidayat & Darwin, 2017).

Menurut Arsyad 2004, salah satu kendala dalam hal pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik daerah secara total.

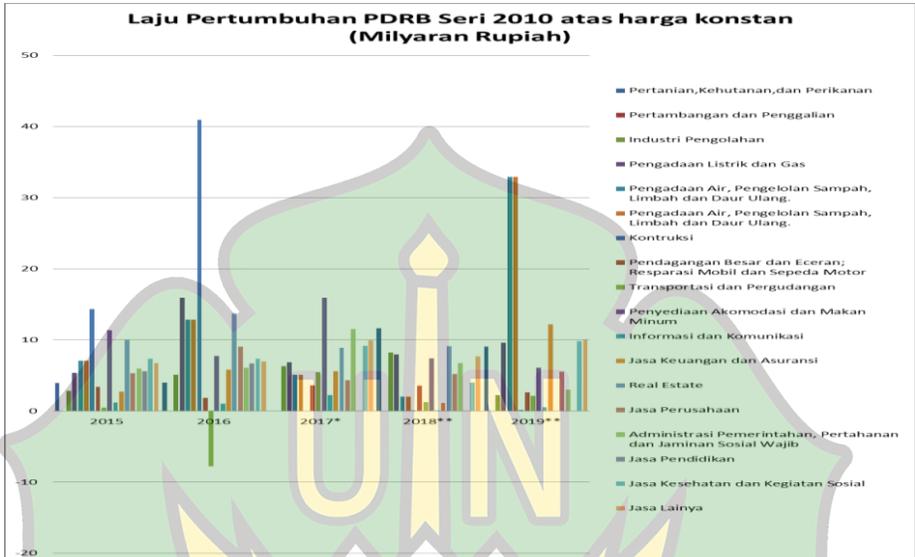
Pemerintah Indonesia memberlakukan UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini, otonomi daerah berusaha untuk mencapai kekuasaan yang lebih besar dengan memberikan daerah, terutama kabupaten dan kota. Sementara itu, kekuasaan pemerintah pusat dibatasi pada 5 (lima) departemen, yaitu: pertahanan dan keamanan nasional, politik luar negeri, keuangan dan mata uang, keadilan dan agama. Pada saat yang sama, selain kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, provinsi memiliki otonomi terbatas dalam mengelola pembangunan daerah, dan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kewenangan bupati dan pemerintah kota. Peraturan Pemerintah (PP) no. 25 Tahun 2000 secara jelas dan khusus mengatur pembagian kekuasaan. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang harus dilaksanakan adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelaraskan fokus pembangunan daerah dengan potensi daerah.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari industri unggulan di wilayah tersebut. Analisis data PDRB suatu wilayah dari satu tahun ke tahun berikutnya untuk menemukan skor unggulan wilayah tersebut. Suatu daerah harus memberikan peran penuh terhadap sektor unggulan, sehingga daerah menjadi pemicu pembangunan ekonomi daerah. Dengan diidentifikasinya sektor ekonomi tersebut dapat dikembangkan dan menjadi acuan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di wilayah tersebut.

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh merupakan pusat hampir seluruh aktivitas penduduk di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadikan kota Banda Aceh unggul dari daerah/kota lain di Aceh dalam banyak aspek. Secara ekonomi, PDRB per kapita menempati urutan pertama di Aceh, pengeluaran per kapita untuk produk non-makanan telah melebihi 50%, dan tingkat kesejahteraan sosial lebih tinggi dan lebih maju. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh merupakan yang tertinggi di Aceh, meskipun merupakan satu-satunya daerah/kota yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini karena banyak fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi. Sedangkan dari segi penyelenggaraan pemerintahan, kawasan perkotaan Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan yang terbagi menjadi 90 kampung (desa) serta 17 kawasan pemukiman (BPS Kota Banda Aceh 2020).

PDRB Kota Banda Aceh pada tahun 2020 terjadi penurunan. Alasan penurunan tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di sebagian besar sektor komersial. Dihitung atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Banda Aceh mencapai Rp 14,67 triliun. Angka ini lebih rendah dari Rp 14,17 triliun pada 2019. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 adalah 3,29%, lebih rendah dari 4,18% tahun sebelumnya.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh 2019

Berdasarkan gambar 1.1 harga konstan seri tahun 2010 kategori Informasi dan Komunikasi mampu mencatat laju pertumbuhan positif diatas 10 persen. Namun karna *share* yang terlalu kecil sehingga tidak dapat membantu menghindari terjadinya kontraksi ekonomi kota Banda Aceh akibat pandemi Covid-19. Kontraksi ekonomi terjadi karan ada tiga kategori sektor ekonomi yakni: Tranportasi dan Pergudangan; perdagangan besar dan Eceran, Rasparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta penyediaan Akomodasi Makan-Minum yang memiliki *Share* terbesar namun tidak tumbuh positif dimasa pandemi Covid-19 yang berimbas membawa ekonomi Kota Banda Aceh menjadi tumbuh negatif untuk pertama kalinya sejak bencana Tsunami Desember 2004 silam.

Ada berbagai macam metode analisis untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan suatu wilayah, di antaranya metode analisis tersebut, metode tipologi klassen, Location Quotion (LQ), dan Shift-Share. Metode tipologi klassen sendiri adalah metode yang dapat dapat membagi sektor ekonomi menjadi empat kategori, yaitu sektor ekonomi prima (Unggulan), sektor ekonomi potensial, sektor ekonomi berkembang, dan sektor ekonomi tertinggal. Menurut Sjafrizal ketika sektor unggulan ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, maka metode ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penyusunan rencana pembangunan daerah (Aufa 2019). Adapun metode Location Quotion (LQ) seperti dikemukakan Bendavid (1991), digunakan untuk menganalisis keragaman basis ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan sektor dan tujuan menyupplay kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Menurut Sjafrizal (2008) Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Hajeri Dkk, 2015). Sedangkan Analisis shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan

struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kinerja atau produktivitas tenaga kerja perekonomian daerah dengan membandingkan perekonomian daerah dengan daerah/negara yang lebih besar (Basuki & Mujiraharjo, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti sendiri hanya menggunakan metode tipologi kelas dan *shift-share*, alasan peneliti hanya menggunakan metode ini karena pada dasarnya metode analisis *Shift-Share* membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah, untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah dibandingkan dengan perekonomian daerah yang lebih tinggi. Analisis *Shift Share* juga dipergunakan untuk menganalisis pertumbuhan dan pergeseran sektor-sektor ekonomi di daerah Kabupaten Banda Aceh. Analisis ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan erat dengan tiga komponen yaitu komponen karena pertumbuhan nasional (Aceh), komponen reaksi antar sektor industri (*industrial mix*) dan pangsa relatif sektor-sektor daerah (*regional share*) terhadap sektor-sektor nasional (Way, Engka, & Siwu 2019).

Sedangkan metode analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor ekonomi suatu daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi sektor ekonomi daerah yang diamati dapat menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), sektor maju tapi tertekan

(*high income but low growth*), sektor berkembang cepat (*high growth but low income*), dan sektor relatif tertinggal (*lowgrowth and low income*). Menurut Wahyuningtyas, Rusgyono, & Wilandari, (2013) Untuk menentukan sektor unggulan dengan mengacu kepada dua alat analisis yang telah dilakukan yaitu dari hasil perhitungan Gabungan Shift Share dan Tipology Klassen maka dapat dilakukan dengan melihat overlay (Gabungan) kedua alat analisis tersebut. Koefisien dari ketiga komponen tersebut juga harus disamakan dimana disini diberi tanda positif (+) dan negatif (-). Gabungan Tipologi Klassen dan *Shift-Share* nilainya sama-sama (++) positif artinya sektor tersebut dikatakan sektor unggulan. Sedangkan jika nilai jika salah satu nilai dari metode tipologi kelas dan shift share negatif (-+) maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non-unggulan.

Berdasarkan teori-teori regional dan juga UU Otonomisasi Daerah No 32 tahun 2004 yang menjalankan bahwa daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengelola potensi sumber daya yang tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan teori-teori regional dan juga UU Otonomisasi Daerah No 32 tahun 2004 yang menjalankan bahwa daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mengelola potensi sumber daya yang tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu dalam kaitannya, maka perubahan struktur ekonomi dan sektor-sektor unggulan di Kota Banda Aceh adalah hal yang menarik untuk

diteliti lebih mendalam, karena melalui penelitian ini dapat diketahui perubahan struktur perekonomian Kota Banda Aceh sekaligus dapat mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Banda Aceh dimana nanti hasilnya diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan yang khususnya berkenaan dengan pengembangan dan penentuan sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2017-2022.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Tipology Klasen Dan Shift-Share”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sektor manakah yang menjadi Sektor Unggulan di Kota Banda Aceh berdasarkan penggabungan (peng-overlayan) metode tipologi Klassen dan Shift-Share?
2. Sektor apa saja yang memberikan Penyumbang Kontribusi daya saing terbesar di Kabupaten Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sektor manakah yang menjadi sektor ekonomi unggulan kota Banda Aceh 2015-2020.
2. Untuk Mengetahui Sektor apa saja yang memberikan Penyumbang Kontribusi dayaasaing terbesar di Kota Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis mampu memberikan informasi terkait Sektor manakah yang menjadi sektor unggulan serta sektor apa saja yang menjadi penyumbang kontribusi dayaasaing terbesar di Kota Banda Aceh periode 2015-2020.
2. Secara praktisi mampu menjadi referensi bagi penelitian atau studi berikutnya yang berkaitan dengan analisis sektor-sektor unggulan yang akan diterapkan di tempat-tempat lainya serta menjadi referensi bagi pemerintah serta instansi-instansi setempat dalam membuat kebijakan terkait pengembangan pembangunan ekonomi regional.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan landasan teori, mengenai pengertian pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, keterkaitan antar variabel independen terhadap variabel dependen, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Narasi hasil analisis data, dan Pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan Kesimpulan dan Keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah

Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersifat menyeluruh, terkoordinasi, seimbang, dan berkelanjutan, serta bertujuan menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai unit pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, harus ada pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan antar daerah dan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata antar daerah. Kawasan berkonotasi dengan lokasi kegiatan pembangunan atau kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, fasilitas pelayanan, dll. Oleh karena itu, lokasi atau penentuan akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan tersebut. Orang dapat menikmati hasilnya sebagai cara untuk meningkatkan keadilan dan keadilan. Kebahagiaan dalam segala aspek kehidupan (Herawaty & Bangun, 2018).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang meliputi pembentukan kelembagaan baru, pengembangan industri alternatif, peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi. dan pengembangan bisnis baru. Dalam pembangunan ekonomi daerah, masalah utama terletak pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogen*), dan potensi pemanfaatan sumber daya manusia, sistem dan sumber daya material setempat. Orientasi ini

menyebabkan diadopsinya inisiatif dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Subandi, 2016).

Menurut Royat dalam Papera (2018), wilayah andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Dibandingkan dengan lokasi lain di provinsi atau kota/kabupaten, kawasan ini memiliki standar pertumbuhan yang cepat, memiliki industri unggulan, dan memiliki ikatan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Perbedaan wilayah menunjukkan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya manusia dibatasi dan dihambat oleh pemerintah karena lingkungan akses yang berbeda. Pemerintah harus terus memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah dapat melibatkan berbagai sektor dan peserta pembangunan, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan jaringan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan. Sejak reformasi, sistem administrasi pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi atau otonomi daerah, yang berarti bahwa sebagian besar proses pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi administrasi pemerintahan telah berubah. Ambil wilayah sebagai pusat. Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk terus bertambah yang berarti permintaan

ekonomi juga semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pendapatan tambahan setiap tahunnya. Pendapatan tambahan ini dapat diperoleh dengan meningkatkan total produksi (barang dan jasa) atau produk domestik bruto daerah (PDRB) setiap tahunnya (Nurlina Dkk, 2019).

Menurut Miroah (2015), Dalam pembangunan ekonomi daerah tidak mungkin semua sektor ekonomi dapat berkembang secara bersamaan, melainkan lebih mengutamakan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang potensi pertumbuhannya lebih besar. Karena industri ini diharapkan tumbuh dan berkembang pesat, serta akan mendorong berkembangnya industri-industri terkait lainnya untuk mengikuti perkembangan industri-industri potensial tersebut. Pesatnya pertumbuhan sektor-sektor potensial tersebut akan mendorong terjadinya polarisasi unit-unit ekonomi lainnya dan pada akhirnya secara tidak langsung sektor-sektor ekonomi lainnya akan mengalami perkembangan.

Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, dan rakyat dapat menikmati hasilnya, sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan secara adil dan merata. Sebagai salah satu upaya untuk menggambarkan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, diperlukan suatu pilar kawasan yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kerjasama pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Menciptakan peluang kerja baru dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian daerah (Herawaty and Bangun 2018).

Pembangunan ekonomi regional (regional) merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, penanaman modal, pengembangan sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi, struktur industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antardaerah, potensi modal dan keuangan. Kapasitas, pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan yang lebih luas (Vikaliana 2017).

Nurlina Dkk (2019), Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan kerja, dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dapat menciptakan lapangan kerja terbaik dari segi kuantitas, produktivitas, dan efisiensi.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, memberikan peluang bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah

merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Kebijakan utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah melakukan segala kemungkinan untuk mencocokkan prioritas pembangunan daerah dengan potensi pembangunan daerah. Hal ini terkait dengan berbagai potensi pengembangan yang dimiliki setiap daerah, sehingga setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan (Herawaty & Bangun 2018).

Konsep pembangunan suatu wilayah harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri. Pemilihan prioritas pembangunan yang melibatkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat pada hakekatnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan daerah yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan karakteristik khusus daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya adalah pengambilan keputusan dan intervensi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan proses pembangunan daerah. Analisis ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal. Semua ini diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan daerah dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Hidayat & Darwin, 2017).

Menurut Rizani (2017) Dalam menentukan potensi kegiatan ekonomi daerah, ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan, yaitu faktor sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya saing dalam

beberapa tahun terakhir dan sektor ekonomi yang memiliki potensi pengembangan ke depan. Dengan mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah, dapat dirumuskan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi (Herawaty & Bangun, 2018).

Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan di semua sektor ekonomi, tetapi pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan potensi pembangunan yang besar diprioritaskan. Industri ini diharapkan tumbuh dan berkembang pesat, sehingga mendorong industri terkait lainnya untuk mengimbangi perkembangan industri potensial tersebut. Tiga tujuan utama pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) meliputi: (1) meningkatkan suplai dan memperluas distribusi berbagai kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, perlindungan kesehatan dan keselamatan, dan (2) meningkatkan standar hidup. Tercermin dalam bentuk peningkatan pendapatan, juga mencakup peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan perhatian terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang kesemuanya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan materil, tetapi juga meningkatkan diri. harga diri rakyat dan negara, (3) Memperluas pilihan dan tanggung jawab sosial setiap individu dan seluruh negara, yaitu membebaskan mereka dari jeratan perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya terhadap orang atau negara lain, tetapi juga terhadap kekuatan apa pun yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan mereka (Parera, 2018).

Safrijal (2014) berpendapat bahwa kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan proses pembangunan daerah secara umum. Analisis ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal. Semua ini untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Gunawan, 2019).

Kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya adalah pengambilan keputusan dan intervensi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan di daerah tertinggal. Semua ini diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan daerah dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat (Hidayat&Darwin, 2017).

Menurut Arsyad dalam Diartho (2018), pembangunan ekonomi daerah merupakan proses strategis pembentukan model dalam perencanaan. Strategi pembentukan model tersebut memungkinkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk berinteraksi dengan baik dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya yang tersedia. Sumber daya. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pembangunan kawasan perkotaan sebagai ibukota pemerintahan, pusat pelayanan dan pusat sosial budaya harus dibina, diatur, dan dimajukan agar dapat berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Pengelolaan kawasan perkotaan perlu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunannya sendiri berdasarkan kondisi utama dan masalah utama yang dihadapi kota. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari proses pembangunan suatu negara atau wilayah. Alasannya, karena pertumbuhan kemakmuran biasanya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah kota untuk mendorong pembangunan antara lain: meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, mengembangkan kawasan industri, mengembangkan pusat pasar modern, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi (Sjafrijal, 2017).

Hertantingsih (2018), Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan adalah koordinasi dan keterpaduan, baik itu keterpaduan antar departemen, antar departemen dan daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun antar provinsi dan kabupaten/kota. Melalui integrasi ini, berarti akan ada kesamaan pandangan, saling isi, dan tidak ada tumpang tindih antara rencana pembangunan daerah dengan daerah lain. Tujuan pembangunan yang diharapkan adalah untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat yang adil, ketersediaan komersial, dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan daerah adalah dengan menetapkan kota atau wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan cara untuk memajukan dan merangsang pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rahayu (2014), Pembangunan daerah adalah upaya pembangunan suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknis, dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Pertumbuhan ekonomi menargetkan daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas daerah, serta akan mempercepat kemajuan ekonomi, karena kemajuan daerah secara tidak langsung akan memungkinkan masyarakat untuk menemukan kehidupan yang lebih bermartabat di daerahnya. Setelah pelaksanaan pembangunan pusat pertumbuhan, kegiatan koordinasi pusat pertumbuhan dan basis sumber daya pedesaan harus menghasilkan efek menetes ke bawah dan efek difusi, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan juga dapat tumbuh. Pada gilirannya, pemerataan kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di daerah pedesaan atau perkotaan, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tertinggal (Hertantiningasih, 2018).

Kuncoro dalam Diartho (2018), rencana pembangunan daerah mer upakan rangkaian strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. untuk meningkatkan kapasitas. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan potensi lokal di bidang ini, dan untuk meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk menciptakan nilai bagi sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

2.2 Teori Basis Ekonomi

Salah satu tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi daerah adalah perubahan struktur ekonomi daerah yang terjadi seiring dengan kemajuan pembangunan daerah. Tidak semua sektor ekonomi memiliki kapasitas pertumbuhan yang sama, sehingga para perencana pembangunan daerah seringkali menggunakan sektor-sektor inti yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi(Vikaliana, 2017).

Teori dasar ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson 1973, yang meyakini bahwa determinan utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa di luar wilayah tersebut (Chumidatul, 2015).

Memaksimalkan potensi suatu daerah akan membawa keuntungan bagi daerah tersebut. Dengan memaksimalkan kegiatan ekonomi sektor-sektor potensial, sektor-sektor tersebut akan berkembang dan menjadi sektor inti daerah di masa mendatang. Peningkatan kegiatan ekonomi di sektor inti dan sektor potensial daerah akan berdampak pada peningkatan PDRB daerah. Hal ini

dikarenakan adanya spesialisasi menurut departemen atau subsektor unggulan masing-masing daerah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus jelas sektor mana yang menjadi sektor dasar dan sektor non-basis, dan sektor mana yang memiliki potensi pengembangan, sehingga sektor-sektor potensial tersebut akan menjadi sektor basis baru daerah di masa mendatang (Vikaliana, 2017).

Pengembangan industri yang menggunakan sumber daya lokal (termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor) akan menciptakan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Hipotesis ini memberikan pemahaman bahwa jika suatu daerah dapat memenangkan persaingan dari sektor yang sama di daerah lain untuk berproduksi dan mengekspor, maka daerah tersebut akan memiliki sektor unggulan (Suyatno, 2000:146).

Sirojuzilam (2010) mengatakan beberapa aktivitas ekonomi di dalam suatu wilayah secara khusus merupakan aktivitas-aktivitas basis ekonomi, yaitu dalam arti pertumbuhannya memimpin dan menentukan perkembangan wilayah secara keseluruhan, sementara aktivitas-aktivitas lainnya yang non basis adalah secara sederhana merupakan konsekuensi dari keseluruhan perkembangan wilayah tersebut. Teori ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan wilayah.

Teori ekonomi dasar bertujuan untuk menemukan dan menentukan kegiatan dasar suatu wilayah, kemudian memprediksi

kegiatan dan menganalisis dampak tambahan dari kegiatan ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori ekonomi dasar adalah bahwa ekspor adalah mesin pertumbuhan. Pertumbuhan suatu daerah tergantung pada kinerja permintaan barang dan jasa eksternal daerah tersebut. Geliat kegiatan ekonomi merupakan mesin utama pembangunan daerah. Semakin besar ekspor dari suatu daerah ke daerah lain, maka semakin maju pula pertumbuhan daerah tersebut dan sebaliknya. Setiap perubahan di sektor-sektor dasar akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah (Adisasmita, 2005).

Teori basis ekonomi menurut (Arsyad 1999), Penentu utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah tersebut. Pengembangan industri yang menggunakan sumber daya lokal (termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor) akan menciptakan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Kelemahan teori ini didasarkan pada permintaan eksternal, bukan permintaan internal. Pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi pada kekuatan pasar domestik dan global. Model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis industri dan sektor yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial dan stabilitas ekonomi. Teori ekonomi berusaha untuk menemukan dan mengidentifikasi kegiatan dasar suatu wilayah, kemudian memprediksi kegiatan tersebut dan menganalisis dampak tambahan dari kegiatan ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori ekonomi dasar adalah bahwa ekspor adalah mesin pertumbuhan.

Pertumbuhan suatu daerah tergantung pada kinerjanya dalam menghadapi permintaan barang dan jasa dari luar negeri.

2.3 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Rizani berpendapat bahwa dalam menentukan potensi kegiatan ekonomi daerah, ada dua faktor utama yang harus dipertimbangkan, yaitu sektor ekonomi yang berdaya saing dan menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir dan sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di masa depan. Dengan mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah, dapat dirumuskan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi (Herawaty & Bangun, 2018).

Sektor unggulan adalah industri yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing dengan produk industri di wilayah lain, dan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, sektor unggulan adalah sektor kegiatan usaha yang dapat diunggulkan dalam rangka pembangunan dan pembangunan ekonomi, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Masing-masing wilayah memiliki sektor keunggulan ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari potensi alam yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan.

Rachibini berpendapat bahwa di suatu daerah, sektor unggulan harus memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, terutama faktor pendukung sektor unggulan yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Anda dapat menciptakan peluang investasi

dengan mengotorisasi departemen utama yang termasuk dalam wilayah terkait (Parera, 2018).

Sektor unggulan suatu wilayah (regional) berhubungan erat kaitannya dengan data PDRB wilayah tersebut. Hal ini karena PDRB mengandung informasi yang sangat penting, antara lain analisis produksi sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan laju pertumbuhan suatu wilayah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan departemen-departemen unggulan merupakan landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki peluang dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah (Parera, 2018).

Sektor ekonomi unggulan dapat didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang mampu menunjang dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang mempunyai daya saing serta pengembangannya tidak mengakibatkan sektor lain menjadi “mati” dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Sebagai contoh, pengembangan sektor perdagangan melalui pembangunan mal yang lokasinya relatif dekat dengan pasar tradisional diperkirakan akan mematikan potensi pasar tradisional tersebut. Contoh lainnya yaitu peningkatan aktivitas eksplorasi penambangan memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan terutama di sekitar lokasi penambangan. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertambangan dan penggalian harus mempertimbangkan aspek lingkungan sektor ekonomi unggulan penting untuk diidentifikasi oleh suatu daerah.

Faktor keterbatasan dana dan sumber daya menjadikan Pemerintah Daerah tidak memungkinkan untuk bisa mengembangkan seluruh sektor yang dimiliki secara bersamaan. Langkah yang bisa dijadikan pilihan adalah dengan melakukan investasi pada satu atau beberapa sektor usaha saja. Sektor yang dipilih merupakan sektor ekonomi unggulan.

Penetapan sektor-sektor ekonomi unggulan merupakan landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki peluang dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Dalam Usya Chumaidatul (2015), kriteria sektor unggulan adalah: Pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi sektor unggulan tinggi, tingkat penyerapan tenaga kerja kedua sektor unggulan relatif besar, dan hubungan antara dua sektor dari tiga sektor unggulan. Maju dan tertinggal, dan empat sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Menurut Rachbini (2001) menyatakan ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk dengan permintaan yang cukup besar untuk tumbuh lebih cepat di bawah pengaruh permintaan.
2. Karena penggunaan kreatif dari perubahan teknologi, fungsi produksi baru berubah dengan pengembangan kapasitas yang lebih besar.

3. Perlu untuk meningkatkan reinvestasi hasil produktif dari sektor-sektor prioritas, termasuk sektor swasta dan pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang agar dapat mempengaruhi sektor lainnya.

Armadi dan Socia (2002), kriteria suatu sektor ekonomi unggulan meliputi.

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi. Artinya, barang-barang berkualitas tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.
2. Komoditas utama memiliki hubungan timbal balik yang kuat antara komoditas utama dan komoditas lainnya.
3. Bahan baku unggulan dapat bersaing dengan produk sejenis di daerah lain dalam hal harga produk, biaya produksi, dan kualitas pelayanan di pasar domestik dan internasional.
4. Barang-barang di daerah yang menguntungkan terhubung dengan daerah lain dalam hal pasar (konsumen) dan pasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah itu sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia).
5. Status teknologi komoditas unggulan terus ditingkatkan, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan dapat dioptimalkan untuk menyerap tenaga kerja terampil sesuai dengan skala produksinya.

7. Komoditas utama dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari tahap kelahiran, tahap pertumbuhan, puncak hingga tahap resesi.
8. Ketika produk dominan memasuki fase resesi, produk dominan lain harus dapat menggantikannya. Komoditas utama tidak rentan terhadap fluktuasi eksternal dan internal.
9. Pengembangan produk yang unggul harus didukung dengan berbagai cara. Misalnya, dukungan keamanan, masyarakat, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/hambatan, dan lain-lain.
10. Pengembangan produk unggulan berpedoman pada perlindungan sumber daya dan lingkungan.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan (*growth*) tidak sama dengan perkembangan (*development*) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya tercermin dari peningkatan produksi barang dan jasa di tingkat nasional, sedangkan pembangunan memiliki dimensi yang lebih luas. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah .Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau wilayah (Parera, 2018).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Jenis pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan Pdrb berdasarkan harga konstan, yaitu menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi), dan menggunakan pengali harga konstan (di bawah inflasi harga konstan) untuk mendapatkan inflasi harga konstan menaikkan harga produksi di bawah harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan dampak dari implementasi kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya pembangunan di masa mendatang. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Parera, 2018).

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk sosial. Peningkatan pendapatan perkapita mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita terlepas dari apakah struktur ekonomi berubah. Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi tidak mengambil pendapatan perkapita sebagai indikator tunggal, melainkan

lebih berfokus pada kualitas proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi jelas mencerminkan dampak kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ini dapat dicapai dan dibentuk oleh berbagai jenis sektor ekonomi, dimana laju pertumbuhan suatu daerah dapat tercermin dari perubahan PDRB (produk domestik bruto daerah) dari tahun ke tahun (Nurliana & Chaira, 2017).

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mahzab Merkantilis, yaitu pemikir-pemikir ekonomi di antara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak membahas peranan perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Perumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional.

Tarigan dalam Hertantingsih (2018), Pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat dijelaskan dari segi fungsi dan geografi. Dari segi fungsional,

pusat pertumbuhan merupakan tempat terkonsentrasinya kelompok-kelompok usaha atau cabang-cabang industri, karena sifatnya yang dinamis sehingga dapat merangsang kehidupan ekonomi (internal dan eksternal). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu tempat dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang dapat menjadi pusat daya tarik (*attractive pole*), yang menyebabkan berbagai jenis perusahaan tertarik untuk mendirikannya dan masyarakat mau menggunakannya. Dalam fasilitas yang ada di kota, bahkan jika tidak, ada interaksi antara sektor-sektor ini.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan dampak dari implementasi kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ke depan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dan berlangsung secara terencana, dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan dan pemerataan hasil pembangunan.

Pertumbuhan merupakan tolak ukur utama keberhasilan pembangunan, dan buah-buah pertumbuhan ekonomi juga akan dinikmati oleh lapisan masyarakat yang paling bawah, baik melalui intervensi otonomi maupun intervensi pemerintah. Untuk melihat fluktuasi aktual pertumbuhan ekonomi suatu wilayah selama setahun, dapat digambarkan dengan menampilkan harga konsumen untuk produk domestik bruto (PDB) daerah secara berkala. Pertumbuhan

positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan negatif menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat(Miroah, 2015).

Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor utama, yaitu primer, sekunder dan jasa--jasa (*tersier*). Tingkat pertumbuhan ekonomi akan diukur dengan indikator pembangunan PDB tahunan atau GNP. Ada tiga metode untuk menghitung laju pertumbuhan: metode tahunan, metode rata-rata tahunan, dan metode faktor majemuk. Ukuran tradisional pertumbuhan ekonomi umumnya dihitung dengan menghitung persentase pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan umumnya dihitung secara riil, dengan tujuan menghilangkan inflasi harga dan jasa yang dihasilkan, sehingga PDB riil mencerminkan perubahan jumlah produksi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah digunakan data produk domestik bruto (PDRB) daerah, dimana PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah atau sistem perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu. Salah satu cara pembangunan ekonomi daerah adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menghitung pertumbuhan pendapatan domestik bruto daerah (PDRB) atas dasar harga konstan. Tingkat pertumbuhan PDRB akan menunjukkan proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan PDRB digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Perhitungan

pertumbuhan biasanya dilakukan secara tahunan untuk memahami perkembangan ekonomi suatu wilayah(Nurliana & Chaira 2017).

Sukirno dalam Nuraini (2017), Pertumbuhan ekonomi berarti bahwa perkembangan kegiatan ekonomi mengarah pada peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, pendapatan nasional riil harus dihitung dengan harga tetap, yaitu harga berlaku pada tahun dasar yang dipilih. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi mengukur capaian pembangunan ekonomi.

Pembangunan daerah menurut Arsyad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model bersama. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga dapat diartikan sebagai proses yang mencakup pembentukan lembaga-lembaga baru, Pengembangan industri alternatif, peningkatan kemampuan angkatan kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, identifikasi pasar baru, pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus berinisiatif mengembangkan perekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah sangat berbeda, sehingga dampak terhadap penurunan dan kenaikan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah juga berbeda-beda, hal ini didasarkan pada keadaan daerah yang sebenarnya dan meniru model pembangunan suatu daerah. Belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Mengenai potensi masing-masing daerah sebagai penopang utama pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditingkatkan, dan melihat potensi dan kondisi ekonomi daerah tersebut dapat dijadikan sebagai rumusan untuk menentukan model, kebijakan, strategi dalam hal pembangunan ekonomi.

2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Widodo (2006:78) Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto (PDB) daerah yang didasarkan pada harga berlaku dan harga konstan. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah tertentu, atau nilai total (bersih) barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh produksi nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah/wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga berlaku setiap tahunnya,

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut, yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDB berdasarkan harga berlaku dapat digunakan untuk melihat perubahan struktur ekonomi, sedangkan perhitungan berdasarkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi aktual dari satu tahun ke tahun lainnya, di mana faktor-faktor perubahan harga telah dikecualikan (Hartono, 2018).

Produk nasional daerah mengacu pada semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di daerah nasional, terlepas dari apakah faktor-faktor produksi itu berasal atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Sedangkan produk daerah merupakan produk dalam negeri ditambah pendapatan dari luar daerah dikurangi pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah. Oleh karena itu, produk daerah adalah produk yang dibentuk oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah.

PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Nilai tambah mengacu pada nilai produksi (produksi) dikurangi biaya antara. Nilai tambah total di sini meliputi komponen pendapatan dari faktor-faktor produksi (upah dan gaji, bunga, sewa dan keuntungan), depresiasi dan pajak tidak langsung bersih. Untuk benar-benar mengukur perubahan produksi atau perkembangan produktivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga perlu dihilangkan dengan menghitung pdrb atas dasar harga konstan.

Secara konseptual, nilai konstan juga dapat mencerminkan volume produksi tahun berjalan, dan penilaian didasarkan pada harga tahun dasar. Dengan menghitung nilai tambah berdasarkan harga konstan setiap bidang usaha atau PDRB berdasarkan pengeluaran, dan dengan menghitung komponen pengeluaran berdasarkan harga konstan, dapat diperkirakan PDRB masing-masing bidang usaha berdasarkan harga konstan nasional. Produk/pendapatan. Pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat tercermin dari perkembangan produk domestik bruto (PDB) regional dan PDRB per kapita. Data PDRB (PDRB) sangat penting bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB juga dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan dapat digunakan sebagai indikator dasar untuk perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan.

PDRB di tingkat daerah menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan produk (nilai tambah) pada waktu tertentu. Ada dua metode perumusan PDRB, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menunjukkan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut asal kegiatan ekonomi (bidang usaha) dan komponen yang digunakan. Dari perspektif wilayah usaha, PDRB merupakan penjumlahan dari seluruh komponen dari total nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh wilayah usaha untuk berbagai kegiatan produktifnya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Sjafrizal, (2014 :183), secara umum PDRB dibagi dalam 2 pembahagian, yaitu: PDRB

dengan harga berlaku dan PDRB dengan harga konstan. PDRB dengan harga berlaku adalah bilamana nilai tambah tersebut dihitung dengan harga tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB dengan harga konstan adalah bilamana nilai tambah tersebut dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). Perbedaan ini penting artinya kalau yang diperlukan adalah nilai tambah riil yaitu tidak termasuk kenaikan harga PDRB dengan harga konstan sangat berguna dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

PDRB memiliki dua metode penyajian, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yaitu semua pendapatan total dinilai dengan harga tetap. Oleh karena itu, pertumbuhan total pendapatan dari tahun ke tahun sepenuhnya disebabkan oleh perkembangan produksi riil, bukan karena kenaikan harga atau pertukaran mata uang. Atau dengan kata lain, PDB dengan harga tetap adalah nilai total produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dihitung dengan harga tetap (harga dalam tahun dasar) selama setahun. Sedangkan PDRB (ADHB) yang dihitung atas dasar harga berlaku adalah nilai total produksi atau pendapatan (beban) yang dievaluasi berdasarkan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (*overall*) dan sektoral. Selain itu, menurut distribusi masing-masing sektor ekonomi dalam nilai total PDRB, perubahan dapat dilihat pada struktur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, pendapatan per kapita

yang diperoleh dengan membandingkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan dapat digunakan untuk membandingkan derajat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

Membandingkan PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan juga dapat digunakan untuk melihat inflasi atau deflasi apa yang telah terjadi. Menurut Widodo (2006), ada tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB, yaitu:

- a. Pendekatan produksi, yaitu PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu (umumnya satu tahun). Nilai tambah adalah hasil pengurangan produksi dari input antara. Unit-unit produksi ini dibagi menjadi 9 bidang usaha (sektor), yaitu: 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, 2. Pertambangan dan penggalan, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas bumi dan air minum, 5. Konstruksi, 6. Perdagangan, hotel dan restoran, 7. Transportasi dan komunikasi, 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 9. Jasa termasuk jasa pemerintah.
- b. Metode pendapatan, yaitu PDRB adalah jumlah balas jasa yang diikutsertakan oleh faktor-faktor produksi suatu daerah dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Imbalan dari faktor-faktor produksi yang terlibat adalah upah dan gaji (remunerasi tenaga kerja), sewa tanah (remunerasi tanah), bunga modal (remunerasi modal) dan keuntungan (remunerasi

operasi), semua tanpa pemotongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Metode pengeluaran, yang berarti bahwa PDB adalah semua komponen permintaan akhir, termasuk: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan organisasi nirlaba swasta, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik total, (4) perubahan persediaan, dan (5) Ekspor bersih (ekspor dikurangi impor).

2.5 Konsep Sektor Unggulan

Kriteria penentuan sektor unggulan biasanya terkait dengan perbandingan, baik perbandingan regional, nasional maupun internasional. Dalam konteks internasional, jika sektor tersebut dapat bersaing dengan sektor yang sama di negara lain, maka sektor tersebut disebut unggulan. Pada saat yang sama, di tingkat nasional, jika suatu industri di suatu daerah dapat bersaing di pasar domestik atau domestik dengan industri yang sama yang diproduksi di daerah lain, industri tersebut dapat digolongkan sebagai industri unggulan. Jika suatu daerah dapat memenangkan persaingan dengan daerah lain di sektor yang sama, sehingga dapat berproduksi dan mengekspor, maka daerah tersebut akan memiliki sektor unggulan.

Tarigan menyatakan, perencana daerah harus memiliki kemampuan menganalisis potensi ekonomi daerah. Dalam hal ini, kewajibannya di satu sisi harus menentukan sektor-sektor fisik yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah dapat tumbuh pesat, di sisi lain harus dapat menentukan faktor-faktor yang membuat sektor-sektor tertentu memiliki potensi dan potensi yang rendah.

menentukan apakah itu diperlukan pertumbuhan. Tugas pertama adalah mengatasi kelemahan tersebut. Sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, sektor unggulan tidak hanya mengacu pada letak geografis, tetapi juga menyebar melalui berbagai jalur ekonomi, yang dapat mendorong seluruh pembangunan ekonomi(Nurlina Dkk, 2019).

Tumenggung dalam Miroah (2015), sektor unggulan adalah Suatu industri yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan bersaing dengan produk industri sejenis di daerah lain, serta dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan output yang tinggi, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, dan memiliki permintaan yang besar untuk pasar lokal dan ekspor.

Sektor unggulan harus memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan sektor lain di suatu wilayah, terutama faktor pendukung sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dimungkinkan juga untuk menciptakan peluang investasi dengan meningkatkan potensi sektor unggulan di daerah terkait (Rachbini, 2001).

Widodo dalam adyatama (2018),sektor ekonomi unggulan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, departemen terkemuka tidak hanya mengacu pada letak geografis, tetapi juga mengacu pada departemen yang menyebar melalui berbagai jalur ekonomi, yang dapat mendorong seluruh pembangunan

ekonomi. Sektor unggulan adalah sektor yang dapat merangsang pertumbuhan atau perkembangan sektor lain, termasuk sektor yang memberikan input dan sektor yang menggunakan produknya sebagai input dalam proses produksi.

Sektor ekonomi unggulan sering dikaitkan dengan perbandingan, baik perbandingan regional, perbandingan nasional maupun perbandingan internasional. Di tingkat internasional, suatu sektor dianggap unggul jika mampu bersaing dengan sektor yang sama di negara lain. Pada saat yang sama, di tingkat nasional, jika suatu industri di suatu daerah dapat bersaing dengan industri yang sama yang diproduksi di daerah lain (baik di pasar domestik maupun di pasar domestik), industri tersebut dapat digolongkan sebagai industri unggulan. Suyanto 2000, jika suatu daerah dapat memenangkan persaingan dengan daerah lain di sektor yang sama untuk dapat berproduksi dan mengekspor, maka daerah tersebut akan memiliki sektor unggulan.

Widodo (2006:22-28), mendefinisikan berbeda, bahwa suatu sektor ekonomi dianggap unggul disuatu wilayah, apabila:

1. Rata-rata kontribusi terhadap PDB atau tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari rata-rata kontribusi industri yang sama di zona referensi (dengan cakupan yang lebih luas), dan tingkat pertumbuhan PDB atau rata-rata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dari industri yang sama di wilayah referensi.
2. Merupakan sektor yang tumbuh lebih pesat di dalam lingkup wilayah referensi dan memiliki tingkat pertumbuhan PDRB

atau penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor yang sama dalam lingkup wilayah referensi, dimana tingkat pertumbuhan sektor dalam lingkup wilayah referensi dilihat dari nilai *Proportional Shift* (PS), sedangkan keunggulan lokasional dilihat dari nilai *Differential Shift* (DS), dengan menggunakan variabel PDRB atau tenaga kerja

3. Mempunyai tingkat keterkaitan ke depan (*Forward Linkage*) dan ke belakang yang tinggi (*Backward Linkage*), yang dinilai melalui indeks daya menarik (IDM) dan indeks derajat kepekaan (IDK), Sektor yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi unggulan adalah sektor yang memiliki indeks derajat kepekaan dan indeks daya menarik lebih dari satu, Sektor ini mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang menyuplai Inputnya maupun sektor yang memanfaatkan Output sektor ekonomi unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.
4. Sektor memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar.
5. Mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa yang akan datang dengan kriteria yang sama.

6. Memiliki kemampuan untuk meng ekspor hasil produksi ke wilayah lain atau memiliki kemampuan sebagai sektor basis (spesialisasi wilayah) dan merupakan sektor basis yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB atau penyerapan tenaga kerja sebanding atau lebih tinggi daripada laju pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten/Kota lain di wilayah referensi.
7. Memiliki keunggulan pangsa lebih besar dibandingkan wilayah yang lebih luas.
8. Memiliki prospek pemasaran relatif besar dan Menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja relatif besar.

2.5.1 Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan merupakan keputusan publik yang mendorong proses pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Melalui kebijakan ini suatu kondisi sosial akan menjadi kenyataan, baik saat ini maupun pada periode tertentu di masa yang akan datang, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berkembang ke arah yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya adanya keterkaitan sosial ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga kondisi dan perkembangan suatu wilayah tertentu juga akan mempengaruhi kondisi dan perkembangan wilayah yang bersangkutan (Sjafrijal, 2017).

Safi`i (2007), memandang bahwa paradigma baru strategi pembangunan ekonomi daerah meliputi:

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah yang bersangkutan, serta kebutuhan dan kapasitas pembangunan daerah.
2. Pembangunan Daerah tidak hanya terkait dengan Sektor ekonomi terkait, dan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lain seperti masyarakat, politik, hukum, budaya dan birokrasi.
3. Pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas yang berdampak pada percepatan pengembangan departemen lain
Sektor ekonomi potensial yang ada di suatu daerah merupakan Sektor ekonomi potensial suatu wilayah mengacu pada sektor dengan kapasitas produksi tertinggi dibandingkan dengan kapasitas sektor yang sama di wilayah lain. Dengan demikian, produk dan jasa sektor ekonomi potensial dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan sisanya dapat dijual. luar daerah, sehingga daerah tersebut dapat menghasilkan pendapatan. Penerimaan akan mendorong penggunaan sumber daya lokal dan mendorong sektor ekonomi potensial dan pada saat yang sama meningkatkan penggunaan sumber daya di sektor ekonomi non-potensial, sehingga seluruh perekonomian dapat berkembang. Pada akhirnya, setiap sektor ekonomi merupakan pasar bagi industri lainnya. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat (Miroah, 2015).

Pembangunan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus terlebih dahulu menganalisis kegiatan ekonomi atau struktur ekonomi dan tingkat kinerja wilayah tersebut. Jenis analisis ini membantu

untuk memahami karakteristik dan struktur ekonomi suatu wilayah, untuk memahami laju atau kapasitas pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun ke tahun dan peran berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah, untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Syafriзал, 1985:366).

Peran sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah mengatasi keterbatasan dana dan sumber daya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada, dan mengoptimalkan pembangunan kota dalam rangka optimalisasi dan efisiensi. Pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar perencanaan. Tumbuh. Jika kegiatan pembangunan dapat difokuskan pada kegiatan sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan keunggulan atau keunggulan alam daerah, maka pertumbuhan daerah akan dioptimalkan untuk menentukan prioritas pembangunan (Hanifah, 1982:112).

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah jenis ini harus didasarkan pada peluang dan potensi suatu daerah, menonjolkan keunggulan suatu daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap dunia usaha. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan untuk merumuskan kemungkinan strategi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mengidentifikasi sektorsektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masingmasing sektor.

2. Mengidentifikasi sektorsektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari faktorfaktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumberdaya (faktorfaktor produksi) yang ada termasuk sumberdaya manusianya yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan model pembobotan terhadap variabel variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan ditemukan sektorsektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. Menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektorsektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya secara berkelanjutan.

Sektor ekonomi potensial suatu daerah mengacu pada sektor dengan kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitas sektor yang sama di daerah lain. Oleh karena itu, produk dan jasa sektor ekonomi potensial dapat dijual ke luar daerah selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga daerah dapat menghasilkan pendapatan. Penerimaan akan mendorong penggunaan sumber daya lokal dan mendorong sektor ekonomi potensial dan pada saat yang sama meningkatkan penggunaan sumber daya di sektor ekonomi non-potensial, sehingga seluruh perekonomian dapat berkembang. Pada

akhirnya, setiap sektor ekonomi merupakan pasar bagi industri lainnya. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah ini harus didasarkan pada peluang dan potensi suatu daerah, dengan menonjolkan keunggulan suatu daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap dunia usaha (Adyatama,2018).

2.5.2 Analisis Tipologi Klassen

Menurut Safrijal (2014), analisis tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi industri dengan karakteristik yang berbeda, sebagai berikut:

1. Industri yang maju dan berkembang pesat (kuadran 1).
Kuadran ini merupakan kuadran di mana laju pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam PDRB (jika) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan sektor tersebut pada PDRB daerah referensi dan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (ski) adalah lebih besar dari kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. Area referensi (sk). Klasifikasi ini diwakili oleh $si > s$ dan $ski > sk$.
2. Industri berkembang tetapi lambat (stagnan industry) (kuadran 2).
Kuadran ini merupakan kuadran di mana laju pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih kecil dari laju pertumbuhan sektor tersebut pada PDRB daerah referensi, namun kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (ski) adalah

lebih besar dari pasangan sektor sebagai acuan Kontribusi PDRB (SK). Klasifikasi ini diwakili oleh $si < s$ sk.

3. Sektor yang memiliki potensi atau kapasitas untuk berkembang (developing sector) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran di mana tingkat pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam PDRB (jika) lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah referensi, tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (ski) lebih kecil daripada kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB. PDRB sebagai acuan Sumbangan (SK). Klasifikasi ini diwakili oleh $si > s$ dan $ski <$. sk.
4. Sektor ini relatif tertinggal (kuadran empat). Kuadran ini merupakan kuadran di mana laju pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam PDRB (si) lebih kecil dari laju pertumbuhan sektor di wilayah acuan PDRB (s), dan nilai kontribusi sektor tersebut (ski) terhadap PDRB lebih kecil dari kontribusi sektor terhadap kontribusi PDRB. Area referensi (sk). Klasifikasi ini diwakili oleh $si <$. s dan papan salju <sk.

Tabel 2.1 Matrik Tipologi Klassen

Rerata Kotribui Sektoral Terhadap PDRB Banda Aceh Rerata Pertumbuhan Ekonmi Kota Banda Aceh	Kontribusi Sektoral Diatas Rata-rata.	Kontribusi Sektoral Dibawah Rata-rata.
Pertubuhan Ekonomi di atas Rata-rata.	Sektor Ekonomi Andalan	Sektor EkonomiPotensial
Pertumbuhan Ekonomi di bawah Rata-rata	Sektor EkonomiBerkembang	Sektor EkonomiTertinggal

Sumber: Aufa, 2019

Pengklasifikasian sektor ekonomi dengan melihat sektor mana saja yang masuk dalam empat pengelompokan pada matrik Tipologi Klassen, yaitu sektor ekonomi andalan, sektor ekonomi potensial, sektor ekonomi berkembang dan sektor ekonomi tertinggal. Penentuan sektor unggulan dengan metode Tipologi Klassen adalah dengan melihat sektor-sektor yang masuk pada kuadran satu (sektor ekonomi andalan), dikatakan sektor tersebut sebagai sektor andalan apabila laju pertumbuhan sektoral dan kontribusi sektoral di atas rata-rata keseluruhan sektoral PDRB Banda Aceh.

Analisis tipologi klassen digunakan untuk melihat gambaran pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran model dan struktur pertumbuhan daerah ini dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah (Herawaty & Bangun, 2018).

2.5.3 Metode S-S (Shift Share)

Analisis ini pada dasarnya untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan daerah dengan struktur ekonomi daerah, untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah relatif terhadap perekonomian daerah yang lebih tinggi. Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis pertumbuhan dan perubahan sektor ekonomi Kabupaten. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah erat kaitannya dengan tiga komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional, reaksi antar sektor industri (industry mix), dan pangsa relatif sektor regional dan nasional (Engka & Siwu, 2019).

Menurut Soepomo (Taufik, 2011) rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah

sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot Y_n$$

$$M_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = (Y^*_{ij} - Y_{ij}) / Y_{ij}$$

$$r_{in} = (Y^*_{in} - Y_{in}) / Y_{in}$$

Di mana Y_{ij} merupakan PDRB sektor i di Kabupaten x dan Y_{in} adalah PDRB sektor I di Provinsi x .

Analisis Shiftshare adalah metode untuk menganalisis pertumbuhan regional. Melalui analisis ini, alasan pertumbuhan dan potensi pertumbuhan lebih lanjut di masa depan dapat ditentukan. Analisis pangsa perubahan membagi pertumbuhan regional menjadi tiga komponen. Pertama, komponen potensi (partisipasi) menjelaskan perbandingan pertumbuhan daerah dengan pertumbuhan nasional atau menunjukkan mengikuti pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan daerah ditangani dengan cara yang sama seperti pertumbuhan nasional. Kedua, komponen campuran menjelaskan kecepatan relatif pertumbuhan regional dan pertumbuhan nasional. Bagian campuran mencantumkan industri yang tumbuh paling cepat di kawasan ini dibandingkan dengan industri yang sama di tingkat nasional. Ketiga, komponen kompetitif menjelaskan keunggulan kompetitif relatif suatu industri tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan industri di suatu negara. Sebuah departemen dengan keunggulan kompetitif berarti memiliki lingkungan yang kondusif untuk pengembangan departemen terkait (Nugroho, 2003:59).

Robinson (2006), analisis shift-share juga membandingkan perubahan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode shift-share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel.

Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai analisis sektor unggulan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, “Analisis Pemetaan Sektor Unggulan di Kabupaten Banyuwangi” yang ditulis oleh Diartho (2018). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Analisis Shift Share (SSA), dan *Analytical Hierarchy Procces*. Berdasarkan hasil analisis Shift Share sektor ekonomi selama tahun 2010-2014 di Kabupaten Banyuwangi, sektor ekonomi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang mampu tumbuh cepat dan sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan berdasarkan hasil Analytical Hierarchy Procces sektor ekonomi yang diunggulkan di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2010-2014 yaitu sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Sementara itu Prasetya (2018), Penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bogor. dengan menggunakan metode analisis Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share nunjukkan hasil bahwa dari tahun 2012-2016 terdapat 4 sektor yang menjadi sektor unggulan ekonomi atau sektor basis

yakni Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan air, Konstruksi terbukti dengan nilai rata-rata LQ di atas 1 sedangkan 13 sektor yang lain masih belum menjadi sektor unggulan atau tidak menjadi sektor basis di kabupaten Bogor dengan nilai $LQ < 1$.

Penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Nagan Raya oleh Aufa (2019) dengan alat analisis yang digunakan Location Quotient dan Tipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan metode Location Quotient yang menjadi sektor unggulan adalah: 1) Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; 2) Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan 3) Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sementara itu, berdasarkan metode Tipologi Klassen menunjukkan yang menjadi sektor unggulan adalah: 1) Sektor Pertanian dengan Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; dan 2) Sektor Konstruksi. Kesimpulan lainnya adalah Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian adalah sektor yang paling diunggulkan di Kabupaten Nagan Raya, dikarenakan memenuhi kriteria unggulan dari ke dua metode yang digunakan.

Parera (2018), juga Pernah menganalisis “Penentu Sektor Unggulan Di Kota Ambon - Provinsi Maluku”. Berdasarkan hasil perhitungan LQ menurut lapangan usaha/sektor unggulan di Kota Ambon Provinsi Maluku, dapat disimpulkan bahwa perhitungan LQ pada sektor unggulan di di Kota Ambon dapat diidentifikasi terdapat 4 sektor sebagai sektor unggulan yaitu sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi,

transportasi dan pergudangan dan sektor unggulan terakhir yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sebaliknya Berdasarkan Perhitungan Tipologi Klassen menurut Lapangan Usaha tahun 2015 nilai PDRB tertinggi terbagi ada 6 sektor yang termasuk dalam sektor unggulan. Sektor- sektor yang diklasifikasikan $r_i > r$ dan $y_i < y$ berada dalam sektor maju dan tumbuh cepat dan sektor berkembang cepat yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor MN. Jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial dan sektor jasa lainnya.

Kajian mengenai Sektor Unggulan juga pernah dilakukan oleh Herawaty & Br Bangun (2018) dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Potensial Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Karo”. Hasil analisis Typologi Klassen menunjukkan bahwa Kabupaten Karo tergolong sebagai daerah yang berkembang pesat, hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan hasil penghitungan analisis Location Quotient (LQ), sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Karo adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor ekonomi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan guna

peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berdasarkan hasil analisis Shift Share beberapa sektor ekonomi memiliki keunggulan kompetitif yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya.

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Sorong Selatan oleh Engka Dkk (2019). Hasil analisa dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa Sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Sorong Selatan terdiri atas 7 Sektor yakni Pertanian, Kehutanan, Perikanan dengan nilai LQ rata-rata per tahun sebesar 2,80 Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai LQ rata-rata per tahun sebesar 1,52 Sektor Konstruksi dengan nilai LQ rata-rata per tahun sebesar 2,50 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Sepeda dan Mobil dengan nilai LQ rata-rata per tahun sebesar 1,51 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ rata-rata per tahun sebesar, Sektor jasa pendidikan dengan nilai LQ sebesar 2,36. Sedangkan berdasarkan nilai komponen Nij (National Share) maka sektor yang memiliki perkembangan paling cepat di Kabupaten Sorong Selatan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor Konstruksi. Sektor Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Sepeda dan Mobil serta Sektor Jasa Pendidikan.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul dan Peneliti	Variabel	Motode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>“Analisis Pemetaan Sektor Unggulan di Kabupaten Banyuwangi” Herman Cahyo Diartho (2018).</p>	<p>PDRB 2010-2014</p>	<p>Analisis Shift Share (SSA), dan Hierarchy Procces.</p>	<p>Hasil analisis Shift Share sektor ekonomi selama tahun 2010-2014, sektor ekonomi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang mampu tumbuh cepat ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor ekonomi yang memiliki daya saing tinggi di Kabupaten Bayuwangi di Jawa Timur. Sedangkan metode Hierarchy Procces sector perdagangan besar dan ecaram adalah sector yang penyerapan tenaga kerja terbesar.</p>	<p>Persamaan terletak pada Variabel Penelitian yaitu PDRB dan Metode Penelitian Analisis Shif Share.</p>	<p>Metode analisi yang digunakan berbeda yaitu, Tipologi Klassen, dan lokasi penelitian di banda Aceh</p>

Tabel 2.2- Lanjutan

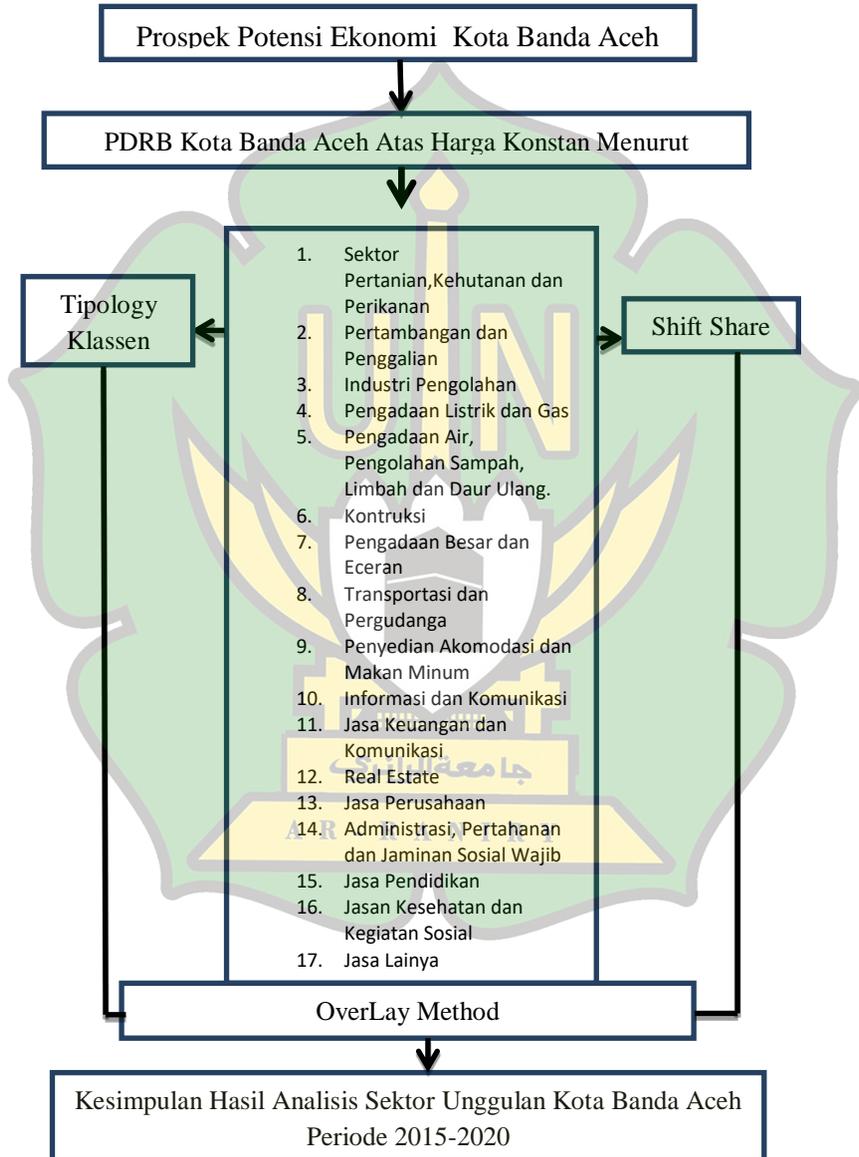
Judul dan Peneliti	Variabel	Motode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
“Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bogor” Eka Rima Prasetya (2018).	PDRB Kab. Bogor dan Jawa Barat 2012-2016	Location Quotient (LQ) dan Shift Share.	Hasil Location Quotient (LQ) dan Shift Share dari tahun 2012-2016 terdapat 4 sektor yang menjadi sektor unggulan yaitu: Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan air, Konstruksi, hal ini terbukti dengan nilai LQ di atas rata-rata.	Sama-sama menggunakan Variabel PDRB Variabel dan Sektor unggulan.	Perbedaannya dilokasi Penelitian yaitu: Banda Aceh.
Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Nagan Raya” Safarul Aufa (2019).	PDRB, PDRB Perkapita Kab. Nagan Raya	Location Quotient dan Tipologi Klassen.	Hasil LQ: sektor unggulan Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian. Selain itu, Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian adalah sektor yang paling diunggulkan karena memenuhi dari ke dua metode yang digunakan	Variabel yang diteliti sama yaitu: PDRB dan metode analisis yang digunakan (LQ dan Klassen Tipologi)	Lokasi Penelitiannya berbeda yaitu: Banda Aceh dan tidak menggunakan metode analisis Shift-Share

Tabel 2.2-Lanjutan

Judul dan Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>“Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kab. Sorong Selatan” Daisy S. M. Engka Dkk (2019).</p>	<p>PDRB Ka.Sorong Selatan (2010-2016).</p>	<p>Location Quotient (LQ) Analisis Shift Share.</p>	<p>Hasil analisis (LQ) menunjukkan bahwa Sektor basis dalam perekonomian Kab. Sorong Selatan terdiri atas 7 Sektor. Sedangkan, berdasarkan nilai komponen Nij, maka sektor yang memiliki perkembangan paling cepat di Kab. Sorong Selatan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.</p>	<p>Sama-sama menggunakan Variabel PDRB sebagai variabel penelitian</p>	<p>Perbedaan hanya menggunakan alat analisis Tipologi Klassen dan Shift Share.</p>
<p>“Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kab. Kepulauan Meranti” M. Hidatay dan Ranti Darwin (2017).</p>	<p>PDRB Kepulauan Maritim.</p>	<p>Analisis Location Quotient (LQ).</p>	<p>Hasil perhitungan LQ Kabupaten Kepulauan Meranti dapat teridentifikasi yang termasuk kategori sektor basis yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri pengolahan</p>	<p>Variabel yang digunakan sama yaitu; PDRB Kabupaten.</p>	<p>Hanya menggunakan satu alat analisis, yaitu; LQ</p>

2.7 Kerangka Berpikir

Mengacu pada teori dan hasil penemuan terdahulu maka kerangka berpikir penelitian adalah seperti gambar dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode analisis deskriptif-kuantitatif, metode ini hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah fenomena yang diteliti. Setiap variabel yang diteliti tidak dilakukan pengujian untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti atau pengujian secara hipotesis. Untuk mengukur suatu objek dan memperoleh hasil dari variabel yang diteliti, penyajian data penelitian kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Sedangkan penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Rancangan Proses penelitian kuantitatif dimulai dengan memilih suatu topik oleh peneliti, biasanya mengawali dengan studi area secara umum. Selanjutnya memfokuskan diri pada pertanyaan penelitian secara lebih spesifik, mengukur variabel, menentukan teknik penelitian apakah melakukan survei atau eksperimen. Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data dalam bentuk angka, setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan analisis data, menggunakan beragam *software* komputer untuk menyajikan bagan, tabel, grafik dan angka-angka statistik serta tahap terakhir adalah membuat laporan hasil penelitian sesuai format tertentu (Hermawan & Yusran, 2017).

3.2 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu Kota dalam Provinsi Aceh. Pertimbangan penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, agar hasil penelitian ini berupa sektor-sektor unggulan dapat digunakan sebagai informasi dan dapat diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh yang merupakan salah satu Kota dalam Provinsi Aceh.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini (Sugiyono 2017). Data yang digunakan dalam bentuk time series PDRB Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh meliputi data: PDRB Provinsi Aceh dan PDRB Kota Banda Aceh berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha (sektoral) dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Secara garis besar, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang berasal dari publikasi ilmiah seperti: jurnal, laporan penelitian, Publikasi serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga konstan, menurut lapangan usaha tahun 2015- 2020, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. Data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha dikota Banda Aceh dari Tahun 2015 sampai tahun 2020 Data ini diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Banda Aceh dan BPS Provinsi Aceh.

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

3.5.1 Sektor Unggulan

Menurut Rachbini (2001), ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Sektor unggulan biasanya terkait dengan perbandingan, baik perbandingan regional, nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, suatu sektor dianggap unggul jika mampu bersaing dengan sektor yang sama di negara lain. Pada saat yang sama, di tingkat nasional, jika suatu industri di suatu wilayah tertentu dapat bersaing di pasar domestik dan domestik dengan industri yang sama

yang diproduksi di wilayah lain, industri tersebut dapat digolongkan sebagai industri unggulan. Sektor unggulan suatu wilayah (regiona) erat kaitannya dengan data PDRB wilayah tersebut. Karena PDRB mengandung informasi yang sangat penting, termasuk analisis produksi sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan laju pertumbuhan suatu wilayah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan sektor-sektor unggulan merupakan landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Karena dengan mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan dapat memiliki peluang dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah (Parera, 2018).

3.5.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Menurut BPS Kota Banda Aceh (2020), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banda Aceh dan Provinsi Aceh dengan periode tahun 2015-2020. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Tipologi Klassen

Mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dengan melihat sektor-sektor mana yang termasuk dalam empat matriks tipologi klassen, adalah analisis tipologi klassen. Dimana dalam matriks ini terdapat empat kategori sektor ekonomi, yaitu: (1) sektor ekonomi unggulan, (2) sektor ekonomi potensial, (3) sektor ekonomi berkembang, (4) dan sektor ekonomi terbelakang. Metode tipologi klassen digunakan untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektor regional. Hasil analisis tipologi klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan partisipasi sektor, sub-sektor atau produk dasar yang merupakan wilayah dari variabel regional. Oleh karena itu, dalam hal ini, tipologi klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah (Kabupaten/kota) dengan pertumbuhan ekonomi daerah acuan (Provinsi) serta membandingkan pertumbuhan PDRB perkapita daerah analisis dengan PDRB perkapita acuan.

Tabel 3.1 Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

<p>Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sektor</i>) $si > s$ dan $ski > sk$.</p>	<p>Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnan sektor</i>) $si < s$ dan $ski > sk$.</p>
<p>Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sektor</i>) $si > s$ dan $ski < sk$.</p>	<p>Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sektor</i>) $si < s$ dan $ski < sk$.</p>

Sumber : Ratnasari, 2014

Ketengan:

Kuadran I : Sektor Maju: $si > s$ dan $ski > sk$

Kuadran II : Sektor Maju tapi Tertekan $si < s$ dan $s > sk$

Kuadran III : Sektor Potensial $si > s$ dan $ski < sk$

Kuadran IV : Sektor Relatif Tertinggal $si < s$ dan $ski < sk$.

Dimana:

si : Rata² Laju Pertumbuhan Sektor Tertentu dalam PDRB Banda Aceh

s : Rata² Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Aceh

ski : Rata² Nilai Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Banda Aceh

sk : Rata² Kontribusi Daerah Aceh

3.6.2 Analisis Shift Share

Putra dalam Fretes 2018, metode analisis Shift share pada umumnya dipakai untuk menganalisis suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya, serta

menginterpretasikan pergeseran pergeseran dari perbandingan itu. Jika pergeseran sektor atau subsektor itu nilainya positif, maka suatu sektor tersebut mengalami keunggulan kompetitif diwilayah tersebut (Soepomo,1993). Bentuk umum dari persamaan Shift Share sendiri adalah (Soepomo,1993):

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \dots \dots \dots 3.2$$

$$M_{ij} = E_{ij}(r_{in} - r_n) \dots \dots \dots 3.3$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots \dots \dots 3.4$$

Dari persamaan (3.2) sampai (3.4) r_{ij} mewakili pertumbuhan sektor/subsektor i diwilayah j . Sedangkan r_n dan r_{in} masing-masing adalah laju pertumbuhan agregat nasional/provinsi dan pertumbuhan sektor/subsektor i secara nasional yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{E_{ij,t} - E_{ij}}{E_{ij}} \dots \dots \dots 3.5$$

$$r_{in} = \frac{E_{in,t} - E_{in}}{E_{in}} \dots \dots \dots 3.6$$

$$r_n = \frac{E_{ij}(r_{ij} - E_n)}{E_n} \dots \dots \dots 3.7$$

Dimana :

D_{ij} : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah j (Banda Aceh) dalam kurun waktu tertentu.

Nij : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah j Banda Aceh yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh

Mij : Perubahan Bauran Industri sektor/subsektor i diwilayah Banda Aceh yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i di provinsi Aceh

Cij : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di Kota Banda Aceh yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah Kota Banda Aceh.

Eij : PDRB sektor/subsektor I diwilayah j Kota Banda Aceh tahun awal analisis

Ein : PDRB sektor/subsektor i wilayah referensi (provinsi Aceh) tahun awal analisis.

En : Total PDRB Aceh tahun awal analisis

Eij,t : PDRB Banda Aceh sektor i tahun akhir analisis

Ein,t : PDRB sektor i di Aceh tahun akhir analisis

En,t : PDRB total Provinsi Aceh tahun akhir analisis.

Berdasarkan Persamaan (3.2)-(3.4) juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu sektor wilayah Banda Aceh (D_{ij}) dapat diuraikan (*decomposed*) menjadi tiga komponen berpengaruh yaitu:

1. Regional Share (N_{ij}) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar daerah, seperti peningkatan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan yang dibuat oleh nasional atau provinsi.

2. Proportional Shift-Share (M_{ij}), merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang tumbuh dengan baik. Selain itu pertumbuhan proporsional share karena adanya perbedaan dalam kesediaan bahan mentah, keragaman pasar dan kebijakan industri.
3. Differential (C_{ij}) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif sering disebut juga komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Modifikasi Estaban –Merquitas terhadap analisis *Shift-Share* dapat dumuskan sebagai berikut (Soepono,1993;48)

$$D_{ij} = E_{ij}(rn) + E_{ij}(rin - rn) + E_{ij}(rij - rin).....3.8$$

3.6.3 Analisis Overlay

Selanjutnya dari semua metode dilakukan peng-overlayan untuk diambil kesimpulan. Analisis Overlay menggabungkan hasil analisis Tipologi Klassen dan Shif Share untuk menentukan sektor unggulan di Kota Banda Aceh . Gabungan hasil analisis menunjukkan hubungan antar metode, berisi sektor apa saja yang akan menjadi masukan serta perhatian khusus pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sektor yang memiliki kriteria (+) terbanyak yang digunakan dalam metode analisis ini Analisis overlay digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik. Metode ini memberikan penilaian kepada sektor- sektor ekonomi

dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu juga sebaliknya jika suatu sektor tidak mempunyai nilai positif yang berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan (Gunawan, 2019).



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Deskripsi Penelitian

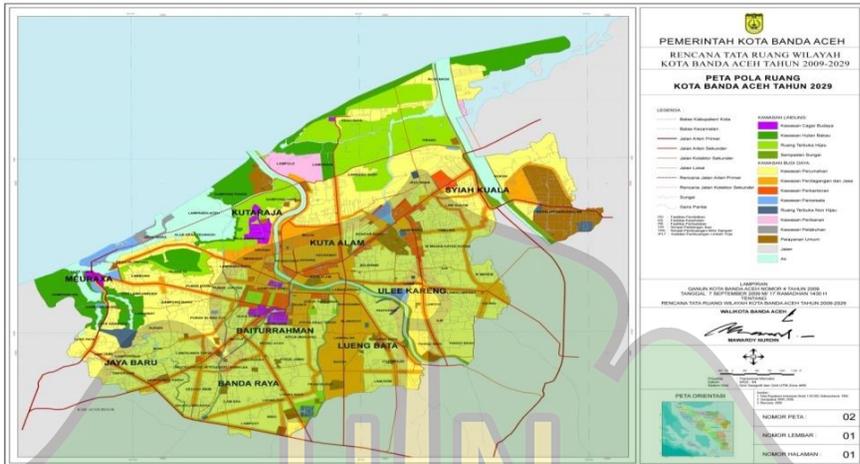
4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan

Bila dilihat secara astronomis Kota Banda Aceh berada antara 05°16'15"- 05°16'15"- 05°36'16" Lintang Utara, 95°16'15"- 95°22'22'35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari pulau Sumatera (Indonesia) dengan daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut.. Oleh karena itu Kota Banda Aceh memiliki batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar

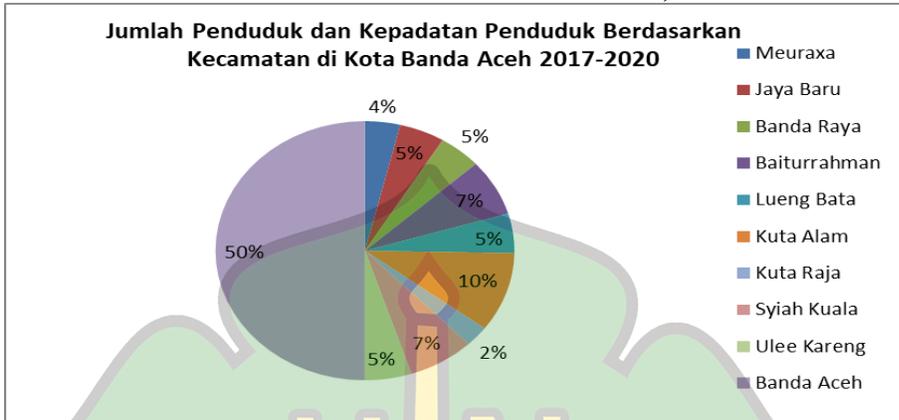
Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 Gampong. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²).

Gambar 4.1 Demografi Pemetaan Wilayah Kota Banda Aceh



Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh. 85,86 persen dari luas wilayah ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan sisanya menjadi kawasan lindung, 14,14 persen dari wilayah Kota Banda diperkirakan menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu, wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Besar di sisi timur dan selatan sehingga memiliki garis pantai yang panjang serta keadaan suhu udara rata-rata relatif tinggi. Penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sebanyak 270.321 jiwa yang terdiri dari 138.993 jiwa penduduk laki-laki dan 131.328 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasio-nya lebih besar dari 100. Pada tahun 2019 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Gambar 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017-2020



Sumber: BPS Kota Banda Aceh (Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP2010)

Berdasarkan Gambar Grafik 4.2 Persebaran penduduk antar kecamatan terlihat masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Masalah yang sering timbul akibat kepadatan penduduk pada umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat juga.

Persebaran penduduk di Kota Banda Aceh terkonsentrasi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala dan

Baiturrahman dengan persentase masing-masing sebesar 19,86 persen, 14,31 persen, dan 14,13 Kecamatan yang paling sedikit penduduknya yaitu kecamatan Kuta Raja dengan jumlah penduduk sebanyak 13.900 jiwa. Kecamatan Baiturrahman yang luasnya hanya 4,54 km² (7,40 persen dari total luas Kota Banda Aceh), merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 8.596 jiwa per km². Kecamatan Kuta Raja merupakan daerah terjarang penduduknya dengan kepadatan penduduk 2.726 jiwa per km² pada tahun 2020.

4.1.2 Wilayah Administrasi dan Ketenagakerjaan

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara Administrasi Kabupaten Banda Aceh Kota terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh menurut Jenis Belanja pada tahun 2020 sebesar 684.746.881,85 ribu rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 587.557.529,88 ribu rupiah dan belanja langsung sebesar 684.746.881,85 ribu rupiah. Aset Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2020 paling banyak difungsikan pada tanah sebesar 3.013.831.094. 799 rupiah.

Tabel 4.1

Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2020

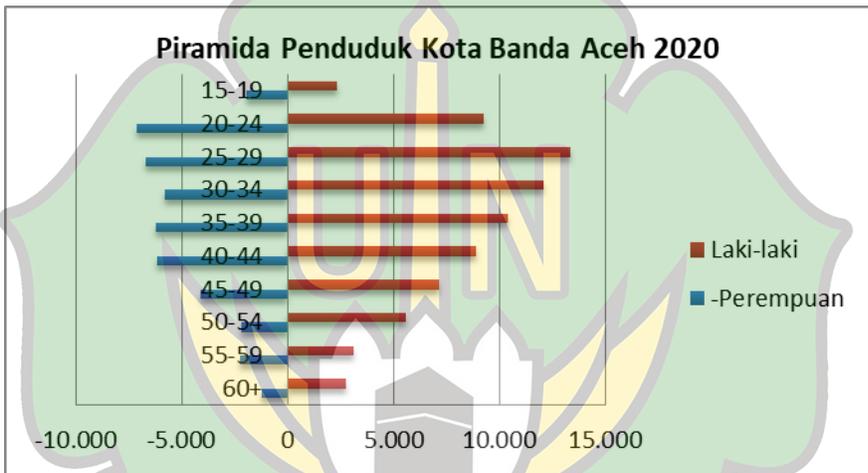
No	Kecamatan	Ibu Kota	Luwah Wilayah (Km ²)	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meuraxa	Ulee Lheue	7,26	2	16
2.	Jaya Baru	Lampoh Raya	3,78	2	9
3.	Banda Raya	Lamlagang	4,79	2	10
4.	Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54	2	10
5.	Lueng Bata	Lueng Bata	5,34	1	9
6.	Kuta Alam	Bandar Baru	10,05	2	11
7.	Kuta Raja	Keudah	5,21	1	6
8.	Syiah Kuala	Lamgugob	14,24	3	10
9.	Ulee Kareng	Ulee Kareng	6,15	2	9
10.	Jumlah Total		61,36	17	90

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020*

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terjadi bila kualitas angkatan kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dunia

usaha. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim pula. Imbasnya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh terhadap capaian kualitas hasil produksi barang dan jasa yang rendah.

Grafik 4.3 Kelompok Umur Penduduk Bekerja Kota Banda Aceh



Sumber: BPS Kota Banda Aceh (SIKERNAS, 2020)

Dapat dilihat pada Grafik 4.3. bahwa piramida penduduk bekerja timpang ke arah penduduk laki-laki. Dapat dilihat juga pada Grafik 4.4 bahwa penduduk bekerja terbesar berada pada kelompok umur 25-29 tahun. Terdapat 20.037 orang atau 10,54 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Kota Banda Aceh tahun 2020 berada di kelompok umur ini. Pada kelompok umur ini, 67,57 persen dari mereka yang bekerja adalah laki-laki. Seperti halnya piramida angkatan kerja, semakin bertambah kelompok usia makin sedikit pula jumlah penduduk yang bekerja. Semakin banyak angkatan kerja pada suatu kelompok usia, semakin banyak pula penduduk yang bekerja.

Hal tersebut berlaku baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan.

4.1.3 Struktur Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha akan menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Gambar 4.4 Peranan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

No	Kategori Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	1,02	1,12	1,18	1,29
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	2,12	2,25	2,26	2,11	2,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,34	0,35	0,37	0,39
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,13	0,17	0,17
6.	Konstruksi	10,00	6,56	6,30	6,05	6,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,36	21,46	21,20	20,88	20,04
8.	Transportasi dan Pergudangan	11,28	10,66	9,64	9,08	6,75
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	3,4	4,05	4,29	4,48	4,22
10.	Informasi dan Komunikasi	6,06	5,82	5,17	4,90	5,44
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	3,03	3,01	3,28	3,4
12.	Real Estat	6,84	7,73	8,17	8,61	8,72
13.	Jasa Perusahaan	2,36	2,42	2,41	2,5	2,48
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	21,09	22,72	23,45	23,05	23,11
15.	Jasa Pendidikan	5,84	6,20	6,88	7,41	8,39
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,59	3,72	3,69	3,9	4,43
17.	Jasa Lainnya	1,76	1,89	1,94	2,05	2,17
18.	Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Selama 5 tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Banda Aceh didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yakni: Administrasi pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, jasa pendidikan; Real Estat; dan Kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Banda Aceh.

Peranan terbesar dalam pembentukan Pdrb Kota Banda Aceh pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib, yaitu mencapai 23,11%. Selanjutnya Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,04%, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,39%, berikutnya lapangan usaha Real Estat sebesar 8,72% dan lapangan usaha Kontruksi sebesar 6,98%. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib, Real Estat dan Jasa Pendidikan adalah Kategori lapangan usaha yang secara konstan mengalami Peningkatan peranan. Sedangkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor peranannya berfluktuatif namun cenderung menurun. Adapun penyebab meningkatnya untuk kategori lapangan usaha Kontruksi pada tahun 2020 adalah karena pembangunan Trans Studio Mall Aceh yang tengah berlangsung saat ini yang mana Trans Studio Mall tersebut direncanakan akan menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Banda Aceh pada tahun 2020 terjadi penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga menghambat kegiatan ekonomi di sebagian besar lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga Konstan 2010, mencapai 17,67 triliun rupiah, angka tersebut tersebut turun dari 15,17 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,29 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,18 persen.

Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha % 2016-2020

No	Kategori Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	7,64	7,33	9,40	4,64
2.	Pertambangan dan Pengalihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	5,09	6,30	8,43	2,02	-5,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	15,92	6,84	7,96	9,63	5,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,84	5,13	2,04	32,95	-2,61
6.	Konstruksi	4,96	-31,59	0,08	0,13	8,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,84	3,63	3,55	2,64	-6,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	-7,79	5,48	1,23	2,14	-29,45
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	7,72	15,92	7,41	6,07	-12,03
10.	Informasi dan Komunikasi	1,02	2,25	0,09	0,54	13,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	5,6	1,12	2,99	2,24
12.	Real Estat	10,06	13,72	8,9	9,79	-0,45
13.	Jasa Perusahaan	9,05	4,31	5,24	9,82	-3,87
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	11,51	6,75	2,99	-1,57
15.	Jasa Pendidikan	6,7	8,98	8,73	9,79	8,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,37	9,17	4,02	9,82	9,59
17.	Jasa Lainnya	6,96	9,94	7,71	9,79	0,17
18.	Total PDRB	5,93	3,39	4,45	4,18	-3,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Kategori Informasi dan komunikasi mampu mencatat pertumbuhan positif diatas 10%. Namun karena nilai share nya yang terlalu kecil sehingga tidak dapat membantu menghindari terjadinya kontraksi ekonomi kota Banda Aceh yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Akibat pandemi ini pula membawa lebih jauh ekonomi kota Banda Aceh menjadi tumbuh negatif untuk pertama kalinya sejak bencana Tsunami Desember 2004 silam.

4.2 Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan yaitu menggunakan analisis *Typologi Klassen Shift Share dan Overlay Metode*. Dengan tujuan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor yang memiliki daya saing selain itu juga sebagai perbandingan pertumbuhan antara satu sektor dengan sektor lainnya di Kabupaten Kota Banda Aceh.

4.2.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen

Analisis *Typologi Klassen* digunakan untuk melihat bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi serta menentukan sektor unggulan dengan melihat sektor-sektor yang masuk pada kuadran satu. Gambaran tentang pola struktur pertumbuhan ini, dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek ekonomi daerah pada masa yang akan datang.

Berdasarkan tabel 4.2, kita dapat melihat pertumbuhan dan kontribusi rata-rata sektor-sektor ekonomi yang ada di kota Banda Aceh. Dimana sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi paling besar adalah sektor Administrasi Pemerinthan dengan sub-sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,05 dan Kontribusi 21%. Selanjutnya disusul oleh sektor Real Estat dengan kontribusi ekonomi sebesar 7%, Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 0,09 dan kontribusi rata-rata sebesar 6%.

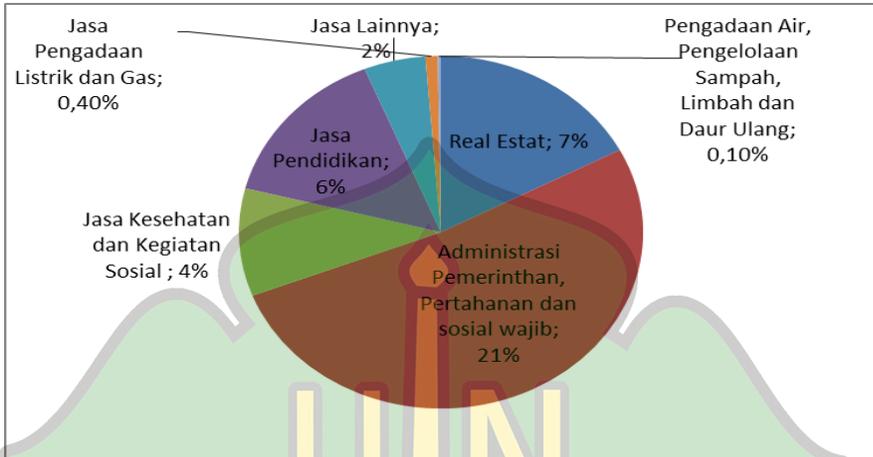
Tabel 4.2 Hasil Pengolahan Data Analisis Tipologi Klasen Sektor Unggulan Kota Banda Aceh 2015-2020

Sektor Lapangan Usaha	Aceh		Banda Aceh		Kuadran
	(S)	(Sk)	(Si)	(Ski)	
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,040	28%	0,066	1%	III
Pertambangan dan Penggalian	0,027	7%	0,00	0,0%	IV
Industri Pengolahan	-0,012	5%	0,033	2%	III
Pengadaan Listrik dan Gas	0,064	0,2%	0,092	0,4%	I
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,085	0,03%	0,101	0,1%	I
Konstruksi	0,054	10%	0,036	8%	IV
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor	0,017	15%	0,010	21%	II
Transportasi dan Pergudangan	-0,037	7%	-0,057	12%	III
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,054	1%	0,050	3%	II
Informasi dan Komunikasi	0,050	4%	0,034	8%	II
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,055	2%	0,054	3%	II
Real Estat	0,055	4%	0,083	7%	I
Jasa Perusahaan	0,042	1%	0,041	2%	II
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,049	9%	0,052	21%	I
Jasa Pendidikan	0,080	3%	0,086	6%	I
jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,068	3%	0,080	4%	I
Jasa Lainnya	0,057	1%	0,069	2%	I

Sumber: Data dioalah, 2021

Sektor jasa kesehatan dan Kegiatan sosial lainnya yang menyumbang pertumbuhan rata-rata dan kontribusi rata-rata sebesar 0,08 dan 6%,serta sektor jasa lainnya dengan kontribusi rata-rata sebesar 6%.

Gambar 4.6 Rata-rata Kontribusi Sektor unggulan terhadap PDRB Kota Banda Aceh 2015-2020



Sumber: Data diolah

Selanjutnya ada sector real Estat dan sector pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, ke-7 sektor ini masuk dalam kuadran I (Sektor maju dan tumbuh degan pesat).

Salain daripada itu terdapat juga sektor dengan kontribusi ekonomi paling tinggi sebesar 21% yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan sub-sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, namun karena pertumbuhannya dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi (0,01), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-munum dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,05 dan rata-rata kontribusi sebesar 8% maka sektor ini hanya masuk dalam kuadran II (Sektor maju tapi tertekan). Adapun untuk sektor dengan pertumbuhan rata-rata dan kontribusi paling kecil bahkan hampir tidak ada adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, hal ini karena Kota Banda Aceh sendiri tidak ada kegiatan eksploitasi Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 4.3 Kesimpulan Hasil Analisis Tipologi Kelas

<p style="text-align: center;">Kuadran I <i>Sektor maju dan Tumbuh dengan Pesat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Real Estat 2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Lainnya 6. Pengadaan Listrik dan Gas 7. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah Limbah dan Daur Ulan 	<p style="text-align: center;">Kuadran II <i>Sektor maju tapi tertekan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontruksi 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Rasparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Informasi dan Komunikasi 4. Jasa Keuangan dan Asuransi 5. Jasa Perusahaan 6. Penyediaan Akomodasi Makan-Minum.
<p style="text-align: center;">Kuadran III <i>Sektor Potensial atau masih dapat Berkembang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Industri Pengolahan 3. Transportasi dan Pergudangan 	<p style="text-align: center;">Kuadran IV <i>Sektor relatif tertinggal</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian

Sumber: Data diolah, 2021

4.2.2 Hasil Analisis Shift-Share

Dengan menggunakan analisis *Shift-Share*, maka kita dapat berasumsi bahwasanya perubahan struktur ekonomi atau hasil kegiatan perekonomian suatu regional berhubungan positif dengan struktur atau kinerja suatu sektor ekonomi dengan wilayah di atasnya seperti Provinsi Aceh. Perubahan kinerja sektor ekonomi suatu daerah terhadap wilayah di atasnya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi (N_{ij}), ekonomi Proporsional (M_{ij}), dan keunggulan kompetitif (C_{ij}).

Tabel 4.4 Analisis Shift-Share Kota Banda Aceh dalam Milyaran Rupiah Tahun 2015-2020

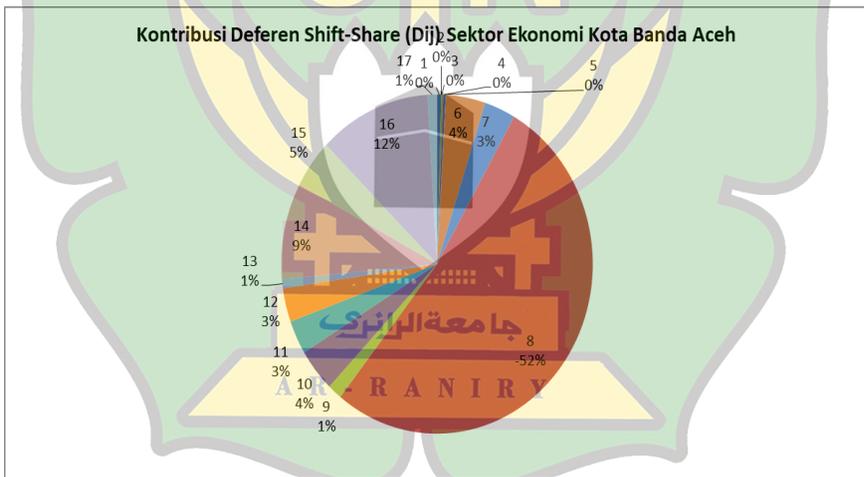
Sektor Lapangan Usaha	2015-2020			
	Nij	Mij	Cij	Dij
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	4757,252157	46386,68746	-19785,16726	31358,77235
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	987,6670774	44285,47746	-61066,3229	-15793,17837
Pengadaan Listrik dan Gas	24,31527826	24433,20746	-8276,634028	16180,88871
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,171191549	6448,747457	-1016,547788	5437,370861
Konstruksi	1643,905014	49809,34746	239870,9718	291324,2243
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor	2708,255218	127128,5475	103954,5777	233791,3804
Transportasi dan Pergudangan	1362,021685	-524900,3525	146098,6456	-3777439,6852
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	195,3612099	93427,14746	13398,33809	107020,8468
Informasi dan Komunikasi	622,4497675	194369,4475	102500,2476	297492,1448
Jasa Keuangan dan Asuransi	260,4511048	95223,94746	26442,95017	231205,8416
Real Estat	637,6582571	366303,4475	-135735,2641	231205,8416
Jasa Perusahaan	104,7204424	61104,44746	2910,772644	64119,94054
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1382,965773	701376,6475	-40297,24461	662462,3686
Jasa Pendidikan	379,4342731	359412,7475	-27611,26641	332180,9153
jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221,2019134	208463,6475	628325,8802	837010,7296
Jasa Lainnya	221,2019134	88063,34746	-16702,37599	71528,1738
Total PDRB	Rp 17.186,00	Rp 1.941.128	Rp 195.761	Rp 2.154.075

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil Analisis Shift-Share yang terdapat pada tabel 4.4 kita dapat melihat bahwasanya Kinerja dari masing-masing sektor ekonomi dari tahun 2015-2020 bisa disimpulkan terjadi peningkatan dengan baik, ini terlihat dari nilainya yang positif.

Seluruh sektor ekonomi yang ada di kota Banda Aceh memiliki nilai pertumbuhan riil positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian (0) dan sektor Transportasi dan pergudangan (-522816,2872), hal ini sesuai juga dengan penelitian (Adyatama, 2018) yang menjelaskan bahwasanya, apabila nilai (D_{ij}) menunjukkan nilai positif, maka terjadi peningkatan kinerja ekonomi dari sektor tersebut serta sektor ini tergolong kedalam sektor yang memiliki daya saing yang tinggi. Sebaliknya apabila nilai D_{ij} -nya maka sektor ini masuk kedalam sektor dengan kategori pertumbuhan yang lambat.

Gambar 4.7 Kontribusi Deferan Shift-Share (D_{ij}) Sektor Ekonomi Kota Banda Aceh 2015-2020



Sumber: Data diolah

Berdasarkan nilai dan angka-angka yang tercantum dalam Tabel 4.4 maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut :

1) Nilai Total (D_{ij}) sebesar Rp 2,154,075,112 rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2020 perekonomian Kabupaten Banda Aceh mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 2.154.075 triliun Peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi. Ada lima sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar yakni:

- 1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp 8,370,107,296
- 2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Rp 6,624,623,686
- 3) Jasa Pendidikan Sebesar Rp 3,321,809,153
- 4) Informasi dan Komunikasi Rp 2,974,921,448
- 5) Kontruksi Rp 2,913,242,243
- 6) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp 2,337,913,804

2) Nilai (C_{ij}) Total sebesar Rp 195760,955 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2020 setiap sektor perekonomian Kabupaten Kota Banda Aceh secara agregat memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitiveness*) yang cepat terhadap perekonomian Provinsi Aceh. Perekonomian Kabupaten Kota Banda Aceh mengalami peningkatan daya saing dengan Pertumbuhan nilai ekonomi sebesar Rp 195.761 rupiah. terdapat 8 sektor selain sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan daya saing negatif (-) terhadap sektor ekonomi yang sama pada perekonomian Provinsi Aceh. 8 sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,

Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang, Sektor Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan Serta Jasa Lainnya. Sedangkan sektor-sektor yang memiliki daya saing yang kuat adalah sektor konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, Serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

- 3) Pergeseran Proporsional (*Proportional Shift*) atau Mij totalnya sebesar 1941127,877 menunjukkan bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2015-2020 perekonomian Kabupaten Kota Banda Aceh secara agregat mengalami peningkatan sebesar Rp 1.941.128 triliun. Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan perekonomian Kabupaten Kota Banda Aceh memiliki pertumbuhan sektoral yang cepat kecuali sektor Transportasi dan Pergudangan. Di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa kegiatan pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Kota Banda Aceh memiliki sinkronisasi yang erat dengan kegiatan sektoral di Aceh seperti dalam hal permintaan produk akhir, ketersediaan bahan mentah, struktur pasar, serta permintaan penawaran barang dan jasa serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ada korelasi dalam kebijakan pemerintahan serta struktur industri, dan keragaman pasar. Komponen pengaruh bauran industri (Mij) yang menunjukkan

nilai positif, selain sektor Transportasi dan Pergudangan (-524900,3525) menggambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor perekonomian Kota Banda Aceh mengalami peningkatan sektoral yang tumbuh cepat di wilayah Provinsi Aceh.

- 4) Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh (national growth effect/ National Share) terhadap perekonomian regional Kabupaten Banda Aceh menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output yakni sebesar Rp 17186,27969 (Rp 17.186,00). Berdasarkan nilai komponen Nij (National Share) maka sektor yang memiliki perkembangan paling cepat di Kota Banda Aceh dibandingkan dengan perkembangan rata-rata Provinsi Aceh adalah Sektor industri Pengolahan dan sektor, Real Estat, dan Sektor Informasi dan Komunikasi.

4.1.3 Analisis Overlay

Analisis Overlay merupakan metode analisis yang memberikan penilaian pada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai Positif (+) dan nilai negatif (-). Sektor dengan jumlah positif (+) yang paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu juga sebaliknya. Dimana sektor dengan nilai negataif (-) maka sektor tersebut bukan sektor unggulan dalam nalisis ini dipergunakan Gabungan dari nilai analisis shift-share dan *Typologi klassen* dengan rata-rata tahun 2015-2020.

Tabel 4.5 Overlay Hasil Shift- Share dan Tipologi Klassen

Lapangan usaha	Overlay		Hasil Overlay, Kesimpulan Sektor Unggulan
	Shift-Share	Tipologi Klassen	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	-	Non Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	-	-	Non Unggulan
Industri Pengolahan	+	-	Non Unggulan
Pengadaan Listrik dan Gas	+	+	Unggulan
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	+	Unggulan
Konstruksi	+	-	Non Unggulan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-	Non Unggulan
Transportasi dan Pergudangan	-	-	Non Unggulan
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	+	-	Non Unggulan
Informasi dan Komunikasi	+	-	Non Unggulan
Jasa Keuangan dan Asuransi	+	-	Non Unggulan
Real Estat	+	+	Unggulan
Jasa Perusahaan	+	-	Non Unggulan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	+	+	Unggulan
Jasa Pendidikan	+	+	Unggulan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	+	Unggulan
Jasa Lainnya	+	+	Unggulan

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil Tipologi Klassen dan Shift-Share yang diOverlay pada tabel 4.5 diatas dari 17 sektor ekonomi yang ada di kota Banda Aceh hanya terdapat 6 sektor ekonomi unggulan, sektor-sektor tersebut antar lain:

- 1) Sektor Real Estat, pertumbuhan kategori ekonomi sektor ini menjadi unggul karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Terbukti juga dimana bertambahnya setiap tahun pembangunan gedung toko/ruko untuk disewakan maupun bangunan rumah baik tunggal maupun kompleks yang disediakan sebagai akibat geliat ekonomi kota dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi pendatang dari luar Kota Banda Aceh.
- 2) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib. Karena hampir semua kegiatan yang bersifat pemerintahan, termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan peraturannya banyak terdapat di Kota Banda Aceh menjadikan alasan kategori sektor ini masuk dalam salah satu sektor unggulan.

Selain itu juga selama periode 2016-2020, pemerintah pusat dan provinsi juga terus melontarkan dana membangun berbagai proyek konstruksi yang menjadi belanja modal. Serta diisi dengan lain Kota Banda Aceh juga merupakan dengan jumlah aparatur sipil negara (ASN) tertinggi dari seuruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

- 3) Sektor Jasa Pendidikan, dengan rata-rata kontribusi sebesar 6% terhadap perekonomian Kota Banda Aceh, menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan. Hal ini tidak terlepas juga dari predikat Kota Banda Aceh sebagai kota

favorit bagi tujuan Pelajar dari kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Aceh. Selain Politehnik Aceh, sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia Banda Aceh, sekolah tinggi ilmu ekonomi Sabang, Terdapat pula 2 Universitas dengan mahasiswa yang mencapai puluhan ribu orang (Universitas Syiah Kuala dan Uin Ar-Raniry) serta berbagai perguruan tinggi yang mampu menampung puluhan ribu mahasiswa lainnya.

- 4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial, kategori sektor ekonomi ini masuk ke dalam 5 besar sektor ekonomi unggulan karena kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cangkupannya cukup luas. Dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih dirumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan samapai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kegiatan profesional. Pada tahun 2020, Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh mencapai 114 unit. Di sisi yang lain, peran rumah sakit RSUZA sebagai rumah sakit rujukan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh juga menjadi penyumbang paling besar dalam sektor ini sehingga menjadikan sektor ini sektor unggulan.
- 5) Selanjutnya sektor Jasa lainnya, sektor lapangan usaha ini masuk dalam sektor unggulan karena cakupannya yang cukup

luas. sektor ini tergabung dalam 4 kategori. Kategori ini mempunyai kegiatan yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa Reparasi komputer dan barang keperluan pribadi, jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB , Badan Regional dan lain-lain. Dilihat dari sub-sektor tersebut, maka tidak heran kalau sektor ini masuk dalam kategori sektor ekonomi unggulan di kota Banda Aceh. Karena peran kota Banda Aceh sebagai ibukota kabupaten sekaligus ibukota Provinsi semua kegiatan sub-sektor ekonomi diatas juga ikut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh.

- 6) Pengadaan Listrik dan Gas, Adapun untuk pertumbuhan rata-rata sektor pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,9 dan rata-rata kontribusi 4% sehingga menjadikan sektor ini masuk dalam salah satu sektor ekonomi Unggulan di Kota Banda Aceh.
- 7) Terakhir sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kategori sektor ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, air hujan dan lain-lain. Pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi yang terjadi di Kota Banda Aceh menyebabkan kebutuhan air bersih juga bertambah. Begitu juga dengan peningkatan jumlah sampah dan limbah rumah tangga

dan usaha yang harus dikelola. Dengan nilai kontrusi topologi kelasen sebesar 10% dan *Shift-Share* sebesar Rp 5,437,370,861 menjadikan sektor ini sebagai sektor unggulan di Kota Banda Aceh.

Adapun untuk ke-10 sektor ekonomi yang tidak masuk dalam kategori sektor ekonomi unggul di Kota Banda Aceh antara lain:

- 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kategori sektor ini hanya menyumbang rata-rata pertumbuhan dan kontribusi ekonomi sebesar 0,07 dan 1%, dengan beroperasinya pelabuhan dan pasar ikan dilampulo menjadikan satu-satunya penyumbang terbesar pada sub-sektor Perikanan yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk sub-sektor Pertanian dan Kehutanan selama 5 tahun terakhir pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut terjadi pada sub-kategori Pertanian, Perternkan, perburuan dan jasa pertanian.
- 2) Dengan luas keseluruhan wilayah kota Banda Aceh 61.359 Ha (61,36 Km²). kategori pertambangan dan penggalian dengan sub-kategori, Pertambangan minyak, dan gas bumi pertambangan tanpa migas serta penggalian tidak ada kegiatan Eksploitasi jenis lapangan usaha ini di Kota Banda Aceh sehingga kategori sektor ini masuk dalam sektor bukan unggulan.
- 3) Industri Pengolahan, Karena nilai pergeseran bersih dan nilai kompetitifnya yang negatif (-61066,3229) menjadikan sektor

Industri pengolahan masuk dalam kategori sektor ekonomi non-unggulan. Walaupun sempat meningkat pertumbuhannya pada tahun 2016 2,12 % menjadi 2,26 pada tahun 2018 tetapi pada tahun 2019-2020 kontribusi sektor ini kembali mengalami penurunan.

- 4) Kontruksi, Jenis bidang usaha yang dalam sektor ini antara lain kontruksi umum dan kontruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan tempat tinggal lainnya. Pada tahun 2020 jenis sektor ini mengalami peningkatan yang salah satu penyumbangannya adanya pembangunan Trans Studio Aceh, akan tetapi karena pertumbuhan dan kontribusi rata-ratanya dibawah sektor yang sama pada tingkat provinsi 0,05 dan 10% menjadikan sektor ini tidak masuk dalam kategori sektor unggulan.
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari seperlima perekonomian Kota Banda Aceh, dengan rata-rata kontribusi sebesar 21%. Namun karena nilai pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 0,01 menjadikan sektor masuk dalam salah satu sektor non-unggulan juga.
- 6) Transportasi dan Pergudangan. Kategori sektor ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang baik yang terjadwal maupun tidak. Di Kota Banda Aceh

sendiri sub-kategori sektor ini hanya terdapat tiga, yakni: angkutan darat; Anggkutan sungai danau dan Penyeberangan serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan; Pos dan Kurir lapangan usaha Angkutan Udara. Selama periode 2015-2020 peranan kategori ini terus menurun setiap tahunnya terhadap perokonomian Kota Banda Aceh, terlebih lagi pada tahun 2020 Karena pembatasan sosila yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berimbas kepada penurunan pertumbuhan sektor ini sehingga masuk ke dalam kategori sektor non-unggul juga di Kota Banda Aceh.

- 7) Sektor Penyediaan Akomodasi makan dan minum. Karena selisih rata-rata kontribusi dengan sektor yang sama ditingkat provinsi hanya sebesar 2% menjadikan sektor ini masuk dalam salah satu sektor Non-unggulan di Kota Banda Aceh. Selain dari pada itu akibat pembatasan sosial yang terjadi yang disebabkan oleh pandemin Covid-19 tahun 2020, banyak berimbas pada sub-sektor ekonomi ini. Dimana banyak sekali rumah makan, kafe-kafe dan Hotel-hotel yang ada diBanda Aceh tidak melakukan operasional sehingga mengalami penurunan pertumbuhan pada sektor ini.
- 8) Informasi dan Komunikasi. Pada tahun 2020, kategori informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 13,30% lebih baik dari tahun 2019 yang tumbuh 0,54%, Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhannya bervariasi. Namun karena pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 0,03 persen dari

pertumbuhan ekonomi nasional 0,05 persen menjadikan sektor ini masuk dalam sektor non-unggulan di Kota Banda Aceh.

9) Jasa Keuangan dan Asuransi. Kegiatan ekonomi pada kategori jasa perantara keuangan dan asuransi selama 5 tahun terakhir cenderung bervariasi antar tahunnya. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan dan kontraksi kategori ini terhadap perekonomian juga bervariasi setiap tahunnya. Hal ini juga yang menyebabkan sektor kategori ini masuk dalam dal sektor non-unggulan di Kota Banda Aceh.

10) Jasa Perusahaan. Kontribusi kategori Jasa Perusahaan cenderung meningkat walaupun sangat kecil selama 5 tahun terakhir. Sempat melaju kencang ditahun 2016 hingga 9,05 persen namun pada tahun 2020 kategori sektor ini mengalami perlambatan salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 sehingga menjadikan sektor ini masuk dalam 11 sektor yang bukan unggul di Kota Banda Aceh.

Merujuk kepada peraturan Pemerintah (PP) program pembangunan nasional, No.25 tahun 2000 merinci secara tegas dan konkrit pembagian kewenangan tersebut. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan hasil penelitian, kabupaten/kota Banda Aceh merupakan Kota dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Selain itu juga Kota

Banda Aceh masuk dalam salah satu Kota dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Indonesia. maka dalam hal ini disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh selaku pembuat kebijakan pembangunan ekonomi, untuk Kedepannya agar memprioritaskan Sektor Penyediaan Akomodasi makan dan minum, Sektor Real Estat, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial, dan sektor Jasa lainnya.

Di sisi lain, Daerah pemerintahan Kabupaten Kota Banda Aceh merupakan lokasi yang strategis perlu adanya upaya yang lebih menunjang dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Produk (PDRB). Oleh karena itu, pemerintah harus mensinergiskan peran sektor unggulan tersebut dengan aktivitas di sektor-sektor lain. Hal ini mengingat, dalam pengklasifikasian ada sektor-sektor lain yang memiliki Sektor maju tapi tertekan dan Sektor Potensial atau masih dapat dikembangkan, sehingga pensinergisan ini diharapkan akan memunculkan sektor-sektor unggulan lain kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui analisis *Typologi Klassen, Shift-Share dan Overlay Method*, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hasil analisis *Typologi Klassen* menunjukkan bahwa sektor yang masuk dalam Kuadran I (Sektor Maju dan tumbuh dengan cepat) adalah: Sektor Real Estat, Sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor jasa Pendidikan, sektor jasa kesehatan dan Kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.
2. Untuk hasil dari analisis *Shift-Share*, Nilai Total (D_{ij}) sebesar Rp 2,154,075,112 rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2020 perekonomian Kabupaten Banda Aceh mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 2.154.075 triliun Peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi dengan enam sektor yang menjadi penyumbang terbesar yaitu: sektor kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa pendidikan, Informasi dan komunikasi, Kontruksi, dan Perdagangan besar dan eceran. Selain daripada itu, dilihat dari

pertumbuhan sektoral Kabupaten Banda Aceh (rn), jika laju pertumbuhan Provinsi Aceh (rin) dan dibandingkan pada tingkat yang sama, maka dalam hal ini berarti laju pertumbuhan Kabupaten Pertumbuhan Sektoral di Banda Aceh selama 2015-2020 tergolong cukup baik (0,17%)

3. Sedangkan berdasarkan analisis Overlay yang menjadi sektor ekonomi unggulan adalah: Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya, Pengadaan Listrik dan Gas serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan sektor ekonomi di Kabupaten Kota Banda Aceh harus dikembangkan melalui strategi pembangunan ekonomi yang tepat sehingga potensi ekonomi di Kabupaten Banda Aceh dapat tumbuh dan memberi Kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping itu pula, disarankan kepada pemerintah agar tidak hanya memprioritaskan untuk mengembangkan Sektor-sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh, melainkan juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi non- unggulan diatas, karena mengingat antara satu sektor dengan sektor lainnya saling keterkaitan. Cara ini dilakukan agar supaya sektor-sektor ekonomi yang lain dapat pula tersinergikan sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh bisa lebih merata kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

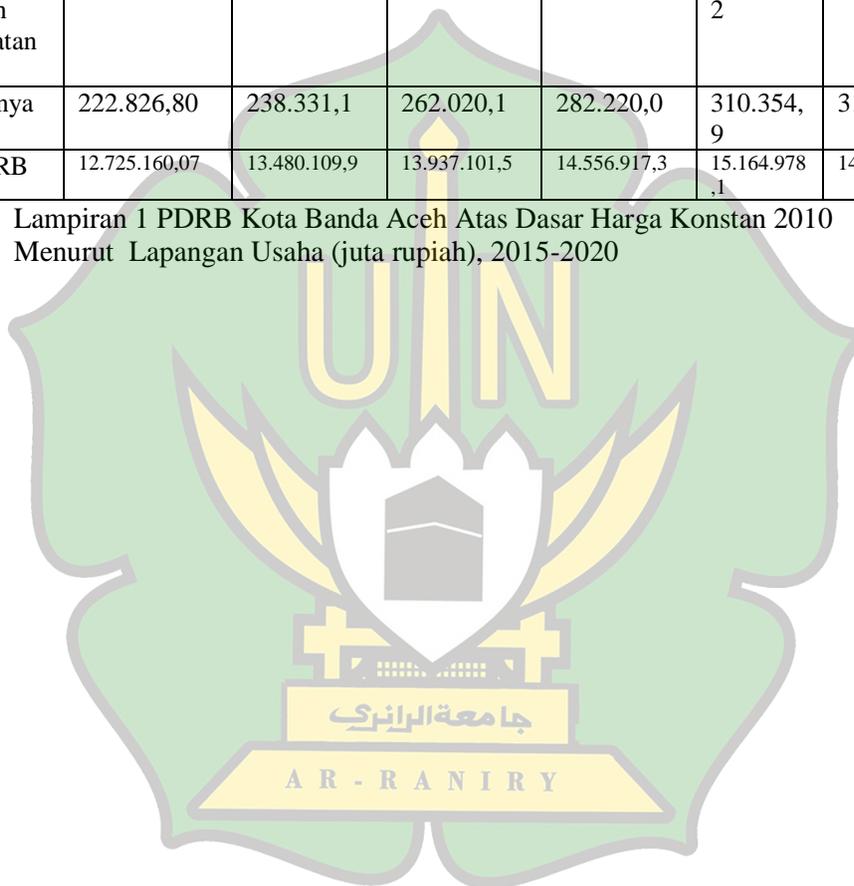
- Aufa, Safarul. 2019. "Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2017." *Jurnal Ekonomi Indonesia* VIII(01): 40–47.
- Basuki, Mahmud, & Febri Nugroho Mujiraharjo. 2017. "Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient." *Jurnal Sains, Tehnologi dan Industri* 15: 2–10.
- BPS Kota Banda Aceh. 2020. "Statistik Daerah Kota Banda Aceh 2020." *Book*.
- Hajeri Dkk. 2015. "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Di Kabupaten Kubu Raya." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4(2): 253.
- Hartono, Rudi, Arfiah Busari, & Awaluddin. 2018. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Upah Minimum Kota (Umk) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja." *journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI Pengaruh* 14(1): 36–43.
- Herawaty, Rita, & Br Bangun. 2018. "Analysis of Potential Economic Sector In Development Of Kabupaten Karo." 5(1): 39–52.
- Hermawan & Yusran. 2017. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Depok-Jawa barat: Kencana Jl. Kebayunan Depok-Jawa barat.
- Hertantiningsih. 2018. "Analisis Pusat Pertumbuhan Kawasan Andalan (Studi Kasus Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah)." : 1–22.
- Hidayat, Muhammad, & Ranti Darwin. 2017. "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti." *media trend* 12(2): 156.
- Miroah, Chumaidatul. 2015. "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen." : 30–32.
- Muh. Aqsha Gunawan. 2019. "Analisis Peran Sektor Unggulan

- Terhadap Perekonomian Kabupaten Sinjai.” *fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*: 1–85.
- Nurliana, & T. Muhammad Iqbal Chaira. 2017. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Samudra Ekonomi* 1(2): 174–82.
- Nurlina, Nurlina, Puti Andiny, & Maulia Sari. 2019. “Analisis Sektor Unggulan Aceh Bagian Timur.” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 10(1): 23–37.
- Parera, Jolyne Myrell. 2018. “Analisis Tipologi Klassen Dan Penentu Sektor Unggulan Di Kota AMBON-Provinsi Maluku.” XII: 51–71.
- Sjafrijal. 2017. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. ke-4. Bandung: ALFABETA,CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. ke-17978-9. Bandung: Alfabeta,Cv.
- Syapsan, Syapsan. 2019. “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Dan Formulasi Strategi Pengembangannya Di Kabupaten Indragiri Hilir.” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19(1): 100–113.
- Vikaliana, Resista. 2017. “Analisis Identifikasi Sektor Perekonomian Sebagai Sektor Basis Dan Sektor Potensial Di Kota Bogor.” *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9(2): 198–208.
- Way, Ester, Daisy S M Engka, & Siwu. 2019. “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Sorong Selatan.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(02): 35–48.

Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kota Banda Aceh Atas Harga Konstan 2015-2020					
	2015	2016	2017	2018*	2019**	2020**
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	123.626,86	128.549,5	138.368,4	148.509,9	162.470,8	170.013,7
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	261.177,77	274.469,2	291.771,3	316.357,1	322.743,9	305.463,4
Pengadaan Listrik dan Gas	44.403,14	51.470,9	54.989,2	59.366,1	65.084,8	68.836,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.367,70	12.827,2	13.485,1	13.760,1	18.293,4	17.816,6
Konstruksi	999.391,60	1.408.789,0	963.815,8	964.615,8	965.826,1	1.049.201,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor	2.763.488,90	2.814.397,3	2.916.498,2	3.020.064,5	3.099.741,4	2.890.617,6
Transportasi dan Pergudangan	1.806.657,40	1.665.846,2	1.757.196,8	1.778.835,4	1.816.923,9	1.281.757,2
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	371.266,20	399.946,4	463.636,7	498.014,0	528.232,1	464.693,5
Informasi dan Komunikasi	1.094.387,40	1.105.564,2	1.130.418,5	1.131.419,5	1.137.489,8	1.288.757,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.288.757,0	338.953,8	357.925,4	361.944,7	406.394,7	415.505,2
Real Estat	761.613,40	838.247,5	953.265,6	1.038.134,4	1.133.057,9	1.127.917,0
Jasa Perusahaan	284.812,40	310.573,7	323.968,2	340.959,8	359.843,2	345.917,0
Admistrasi	2.504.665,20	2.656.798,4	2.962.550,4	3.162.532,7	3.257.16	3.206.042,

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					7,2	0
Jasa Pendidikan	708.918,90	756.390,9	824.337,6	896.333,2	984.078, 9	1.068.331, 8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	446.064,30	478.954,7	522.854,3	543.850,3	597.275, 2	654.528,1
Jasa Lainnya	222.826,80	238.331,1	262.020,1	282.220,0	310.354, 9	310.890,3
Total PDRB	12.725.160,07	13.480.109,9	13.937.101,5	14.556.917,3	15.164.978 ,1	14.666.288,1

Lampiran 1 PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2015-2020



Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kota Aceh Atas Harga Konstan 2015-2020					
	2015	2016	2017	2018*	2019**	2020**
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.186,4	32.355,1	34.052,8	35.426,2	36.626,7	37.897,0
Pertambangan dan Penggalian	9.319,7	8.127,8	8.581,3	9.152,5	9.693,3	10.491,3
Industri Pengolahan	6.474,7	6.096,6	5.921,4	6.410,3	6.339,6	6.058,7
Pengadaan Listrik dan Gas	159,4	176,0	184,0	197,7	211,5	217,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,9	37,1	38,8	41,5	51,6	50,1
Konstruksi	10.776,7	12.140,4	11.631,1	11.949,5	11.949,5	13.900,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor	17.754,1	18.313,0	18.962,4	19.730,3	20.324,5	19.238,7
Transportasi dan Pergudangan	8.928,8	8.885,4	9.328,5	9.577,6	9.861,3	7.056,7
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	1.280,7	1.388,2	1.544,9	1.672,9	1.785,4	1.649,2
Informasi dan Komunikasi	4.080,5	4.191,6	4.305,4	4.401,2	4.632,6	5.187,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.707,4	1.974,7	2.063,2	2.081,2	2.343,0	2.356,0
Real Estat	4.180,2	4.505,7	4.860,9	5.156,6	5.511,0	5.445,7
Jasa Perusahaan	686,5	735,5	769,8	820,7	868,5	840,8
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan	9.066,1	9.950,0	10.807,8	11.486,2	11.851,1	11.459,0

dan Jaminan Sosial Wajib						
Jasa Pendidikan	2.487,4	2.736,0	3.009,1	3.248,1	3.529,0	3.651,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.003,0	3.218,1	3.509,1	3.712,3	3.991,6	4.170,4
Jasa Lainnya	1.450,1	1.543,0	1.670,4	1.759,4	1.886,8	1.914,5
Total PDRB	112.665,5	116.374,3	121.241,0	126.824,4	132.074,3	131.585,0

Lampiran 2 PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar rupiah), 2015-2020



No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan					
		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,93	3,98	7,64	7,33	9,40	4,64
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	2,86	5,09	6,30	8,43	2,02	-5,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,38	15,92	6,84	7,96	9,63	5,76
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,09	12,84	5,13	2,04	32,95	-2,61
6.	Konstruksi	14,32	40,96	- 31,59	0,08	0,13	8,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,40	1,84	3,63	3,55	2,64	-6,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,49	-7,79	5,48	1,23	2,14	-29,45
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	11,35	7,72	15,92	7,41	6,07	-12,03
10.	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,02	2,25	0,09	0,54	13,30
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	5,83	5,60	1,12	12,28	2,24
12.	Real Estat	10,00	10,06	13,72	8,90	9,14	-0,45
13.	Jasa Perusahaan	5,35	9,05	4,31	5,24	5,54	-3,87
14.	Administrasi Pemerintahan,	5,99	6,07	11,51	6,75	2,99	-1,57

	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
15.	Jasa Pendidikan	5,58	6,70	8,98	8,73	9,79	8,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,35	7,37	9,17	4,02	9,82	9,59
17.	Jasa Lainnya	6,74	6,96	9,94	7,71	9,97	0,17
18.	Total PDRB	5,00	5,93	3,39	4,45	4,18	-3,29

Lampiran 3 Laju Pertumbuhan Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2020



Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Table 6. Growth Rate of Implicit Price Index of Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality by Industry (percent), 2016-2020

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	4,00	2,09	7,98	2,13	2,38
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	4,41	2,18	2,23	2,06	0,44
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	0,27	1,27	2,56	0,37	1,37
	3. Perikanan/ Fishery	3,99	2,12	8,48	2,15	2,52
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining & Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	2,16	5,79	-2,45	-3,52	1,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	3,59	12,37	0,84	0,33	-2,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	17,51	7,07	4,41	1,79	1,32
F	Konstruksi/ Construction	1,52	1,30	1,29	1,13	4,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	3,86	2,39	0,75	1,11	1,38
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation & Storage	-2,72	-5,33	-5,73	-2,82	3,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation & food Service Activities	7,08	8,38	4,12	3,67	5,60
J	Informasi dan Komunikasi/ Information & Communication	-0,97	-0,70	-6,41	-0,56	-3,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial & Insurance Activities	2,48	4,49	3,69	2,16	-0,10
L	Real Estat/ Real Estate Activities	1,17	4,86	2,51	1,73	0,19
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	1,24	3,59	0,20	3,28	1,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	5,38	2,03	2,08	0,61	0,31
P	Jasa Pendidikan/ Education	8,37	3,01	7,68	3,33	2,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	0,66	0,33	0,63	1,46	1,96
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	5,77	2,96	0,50	1,35	4,00
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	2,90	2,16	1,08	1,16	1,83

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Regional Bruto Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020
 Table 5. *Implicit Price Index of Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality by Industry, 2016-2020*

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	120,05	122,56	132,34	135,16	138,38
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	129,01	131,82	134,76	137,53	138,13
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	106,09	107,43	110,18	110,59	112,11
	3. Perikanan/ Fishery	119,32	121,84	132,18	135,01	138,41
B	Pertambangan dan Pengalihan/ Mining & Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	121,79	128,83	125,68	121,26	122,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	92,73	104,20	105,08	105,43	102,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	147,34	157,77	164,73	167,67	169,89
F	Konstruksi/ Construction	112,12	113,57	115,04	116,33	121,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	119,93	122,79	123,71	125,08	126,81
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation & Storage	106,98	101,28	95,48	92,79	96,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation & Food Service Activities	134,49	145,76	151,76	157,33	166,14
J	Informasi dan Komunikasi/ Information & Communication	86,59	85,99	80,47	80,02	77,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial & Insurance Activities	135,28	141,36	146,59	149,76	149,60
L	Real Estate/ Real Estate Activities	128,98	135,25	138,64	141,05	141,31
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	120,13	124,44	124,69	128,79	131,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	125,43	127,98	130,64	131,43	131,84
P	Jasa Pendidikan/ Education	121,96	125,62	135,27	139,77	143,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	118,41	118,80	119,54	121,29	123,66
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	116,78	120,25	120,85	122,48	127,38
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	117,21	119,75	121,04	122,45	124,69

Lampiran 5 Indeks Harga implisit Regional Bruto Kota Banda Aceh Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

APPENDIX

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Table 4. Growth Rate of Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality at 2010 Constant Market Prices by Industry (percent), 2016-2020

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	3,98	7,64	7,33	9,40	4,64
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	0,74	2,24	1,07	0,67	1,57
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	3,19	1,15	0,45	0,31	0,32
	3. Perikanan/ Fishery	4,26	8,09	7,83	10,05	4,85
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining & Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	5,09	6,30	8,43	2,02	-5,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	15,92	6,84	7,96	9,63	5,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	12,84	5,13	2,04	32,95	-2,61
F	Konstruksi/ Construction	40,96	-31,59	0,08	0,13	8,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1,84	3,63	3,55	2,64	-6,75
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation & Storage	-7,79	5,48	1,23	2,14	-29,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum/ Accommodation & food Service Activities	7,72	15,92	7,41	6,07	-12,03
J	Informasi dan Komunikasi/ Information & Communication	1,02	2,25	0,09	0,54	13,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial & Insurance Activities	5,83	5,60	1,12	12,28	2,24
L	Real Estat/ Real Estate Activities	10,06	13,72	8,90	9,14	-0,45
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	9,05	4,31	5,24	5,54	-3,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	6,07	11,51	6,75	2,99	-1,57
P	Jasa Pendidikan/ Education	6,70	8,98	8,73	9,79	8,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	7,37	9,17	4,02	9,82	9,59
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	6,96	9,94	7,71	9,97	0,17
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	5,93	3,39	4,45	4,18	-3,29

Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas dasar Konstan Menurut LAPNGAN usaha 2016-2020

Tabel 3. Distribusi Persentase Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

Table 3. Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality at Current Market Prices by Industry (percent), 2016-2020

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	0,98	1,02	1,12	1,18	1,29
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Perikanan/ Fishery	0,90	0,94	1,04	1,11	1,21
B	Pertambangan dan Pengalihan/ Mining & Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	2,12	2,25	2,26	2,11	2,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	0,30	0,34	0,35	0,37	0,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,12	0,13	0,13	0,17	0,17
F	Konstruksi/ Construction	10,00	6,56	6,30	6,05	6,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	21,36	21,46	21,20	20,88	20,04
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation & Storage	11,28	10,66	9,64	9,08	6,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation & Food Service Activities	3,40	4,05	4,29	4,48	4,22
J	Informasi dan Komunikasi/ Information & Communication	6,06	5,82	5,17	4,90	5,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial & Insurance Activities	2,90	3,03	3,01	3,28	3,40
L	Real Estat/ Real Estate Activities	6,84	7,73	8,17	8,61	8,72
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	2,36	2,42	2,41	2,50	2,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	21,09	22,72	23,45	23,05	23,11
P	Jasa Pendidikan/ Education	5,84	6,20	6,88	7,41	8,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	3,59	3,72	3,69	3,90	4,43
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	1,76	1,89	1,94	2,05	2,17
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 7 Distribusi Persentase Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) 2016-2020

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2016-2020
 Table 2. Gross Regional Domestic Product of Banda Aceh Municipality at 2010 Constant Market Prices by Industry (million rupiah), 2016-2020

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	128.549,5	138.368,4	148.509,9	162.470,8	170.013,7
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	9.831,4	10.051,9	10.159,0	10.226,9	10.387,0
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	107,1	108,3	108,8	109,2	109,5
	3. Perikanan/ Fishery	118.611,0	128.208,2	138.242,0	152.134,7	159.517,2
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining & Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	274.469,2	291.771,3	316.357,1	322.743,9	305.463,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity & Gas	51.470,9	54.989,2	59.366,1	65.084,8	68.836,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	12.827,2	13.485,1	13.760,1	18.293,4	17.816,6
F	Konstruksi/ Construction	1.408.789,0	963.815,8	964.615,8	965.826,1	1.049.201,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	2.814.397,3	2.916.498,2	3.020.064,5	3.099.741,4	2.890.617,6
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation & Storage	1.665.846,2	1.757.196,8	1.778.835,4	1.816.923,9	1.281.757,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation & food Service Activities	399.946,4	463.636,7	498.014,0	528.232,1	464.693,5
J	Informasi dan Komunikasi/ Information & Communication	1.105.564,2	1.130.418,5	1.131.419,5	1.137.489,8	1.288.757,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial & Insurance Activities	338.953,8	357.925,4	361.944,7	406.394,7	415.505,2
L	Real Estat/ Real Estate Activities	838.247,5	953.265,6	1.038.134,4	1.133.057,9	1.127.917,0
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	310.573,7	323.968,2	340.959,8	359.843,2	345.917,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	2.656.798,4	2.962.550,4	3.162.532,7	3.257.167,2	3.206.042,0
P	Jasa Pendidikan/ Education	756.390,9	824.337,6	896.333,2	984.078,9	1.068.331,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	478.954,7	522.854,3	543.850,3	597.275,2	654.528,1
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Service Activities	238.331,1	262.020,1	282.220,0	310.354,9	310.890,3
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		13.480.109,9	13.937.101,5	14.556.917,3	15.164.978,1	14.666.288,1

Lampiran 8 PDRB Kota Banda Aceh atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2016-2020

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (persen);

Table 3. Percentage Distribution of GRDP of Aceh Province at Current Market Prices by Industry, 2016-2020 (percent)

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018 ^a	2019 ^a	2020 ^a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	29,39	29,74	29,74	29,51	30,98
1	Pertanian, Perikanan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Husbandry, Hunting & Agriculture Serv.	23,10	23,42	23,34	23,05	24,16
a.	Tanaman Pangan/Food Crops	6,45	6,71	6,57	6,04	6,10
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	4,17	4,18	4,15	4,23	4,50
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	7,21	7,20	7,19	7,19	7,50
d.	Perikanan/Husbandry	4,27	4,31	4,43	4,59	4,82
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services & Hunting	0,99	1,01	1,00	1,00	1,05
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry & Logging	1,41	1,36	1,33	1,23	1,25
3	Perikanan/Fishery	4,89	4,96	5,07	5,23	5,57
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	4,87	4,84	4,99	4,82	4,46
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, & Geothermal	2,17	2,32	2,63	2,54	2,16
2	Pertambangan Batu bara dan Lignit/Coal & Lignite Mining	0,40	0,61	0,78	0,63	0,52
3	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0,42	0,29	0,25	0,29	0,32
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining & Quarrying	1,87	1,44	1,33	1,36	1,46
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,58	5,15	5,21	4,74	4,56
1	Industri Bau-bau dan Pengilangan Migas/Mfg. of Coal & Refined Petroleum Products	0,92	0,93	0,94	0,90	0,89
2	Industri Makanan dan Minuman/Mfg. of Food Products & Beverages	1,93	2,20	2,19	1,83	1,90
3	Industri Pengolahan Tembakau/Mfg. of Tobacco Products	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
4	Industri Tekstil dan Pakain/Jard/Mfg. of Textiles & Wearing Apparel	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas-Kaki/Mfg. of Leather & Related Products & Footwear	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/Mfg. of Wood & of Products of Wood & Cork, & Articles of Straw & Plaiting Materials	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Peretakan dan Reproduksi Media Rekaman/Mfg. of Paper & Paper Products, Printing & Reproduction of Recorded Media	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Mfg. of Chemicals & Pharmaceuticals & Botanical Products	1,06	1,37	1,43	1,28	1,18
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Mfg. of Rubber, Rubber Products & Plastics Products	0,11	0,09	0,09	0,10	0,10
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Mfg. of Other Non-Metallic Mineral Products	0,17	0,16	0,17	0,17	0,16
11	Industri Logam Dasar/Mfg. of Basic Metals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Industri Barang Logam; Komputer, Saringan Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik/Mfg. of Fabricated Metal Products, Computer, Optical Products, and Electrical Equipment	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13	Industri Mesin dan Perantiangan/Mfg. of Machinery & Equipment	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
14	Industri Alat Angkutan/Mfg. of Transport Equipment	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
15	Industri Furnitur/Mfg. of Furniture	0,15	0,15	0,15	0,13	0,12
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacturing, Repair/Installation of Machinery & Equipment	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
1	Ketengalistrikan/Electricity	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
2	Pengadaan Gas dan Produk Esti/Mfg. of Gas & Production of Ice	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
E	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Waste supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
F	Konstruksi/Construction	10,28	9,42	9,38	9,82	10,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	16,05	16,01	15,82	15,91	14,79
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi/Wholesale & Retail Trade & Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1,66	1,83	1,56	1,47	1,42
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale Trade & Retail Trade Except of Motor Vehicles & Motorcycles	14,42	14,48	14,26	14,04	13,37
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	7,13	6,97	6,82	6,45	4,80
1	Angkutan Rel/Railways Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Angkutan Darat/Land Transport	5,06	5,79	5,41	5,36	4,08
3	Angkutan Laut/Las Transport	0,15	0,14	0,15	0,15	0,14
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/River, Lake, & Ferry Transport	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Angkutan Udara/Air Transport	0,83	0,96	0,98	0,85	0,30
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/Warehousing & Support Services for Transportation, Postal & Courier	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation & Food Service Activities	1,37	1,53	1,61	1,69	1,59
1	Penyediaan Akomodasi/Accommodation	0,16	0,18	0,16	0,15	0,10
2	Penyediaan Makan Minum/Food & Beverage Service Activities	1,21	1,25	1,44	1,54	1,49
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	3,08	2,98	2,83	2,85	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial Insurance Activities	1,97	2,01	1,97	2,14	2,11
1	Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	1,87	1,91	1,87	2,04	2,01
2	Asuransi dan Dana Pensiun/Insurance & Pension Funds	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
3	Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate/Real Estate Activities	3,90	4,19	4,19	4,36	4,31
MN	Jasa Perumahan/Business Activities	0,61	0,62	0,63	0,65	0,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration, Defence; Compulsory Social Security	9,94	10,03	10,11	10,25	10,26
P	Jasa Pendidikan/Education	2,43	2,60	2,70	2,88	3,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health & Social Work Activities	2,57	2,63	2,63	2,81	3,09
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1,33	1,39	1,39	1,44	1,49
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB Tanpa Migas/GRDP Without Oil & Gas		96,91	96,76	96,43	96,56	96,35

Lampiran 9 Distribusi Persentase PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

abel 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 (milyar rupiah);
 able 2. GRDP of Aceh Province at 2010 Constant Prices by Industry, 2016-2020 (billion rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018*	2019*	2020**
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	32.355,1	34.052,8	35.426,2	36.626,7	37.897,0
1	Pertanian, Perikanan, Perburuan & Jasa Perikanan/Agriculture, Husbandry, Hunting & Agriculture Serv.	25.313,7	26.859,9	27.924,4	29.079,1	29.914,6
a.	Tanaman Pangan/Food Crops	6.328,3	6.839,4	6.823,1	6.662,6	6.636,1
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	4.255,7	4.444,9	4.491,5	4.948,5	5.195,7
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	8.941,5	9.509,4	10.049,9	10.615,3	11.172,0
d.	Pertanian/Husbandry	4.365,9	4.764,0	5.019,8	5.370,5	5.385,0
e.	Jasa Pertanian & Perburuan/Agriculture Services & Hunting	1.222,4	1.297,7	1.339,9	1.382,3	1.425,7
2	Kehutanan & Pennebangan Kayu/Forestry & Logging	1.731,2	1.764,8	1.783,2	1.678,3	1.667,0
3	Perikanan/Fishery	5.310,2	5.428,2	5.718,6	6.069,4	6.415,4
B	Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying	8.127,8	8.581,3	9.152,5	9.693,3	10.491,3
1	Pertambangan Minyak, Gas & Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, & Geothermal	4.276,1	4.511,1	4.822,6	4.991,2	5.418,7
2	Pertambangan Batu bara & Ugnit/Coal &ignite Mining	1.114,9	1.703,2	2.054,1	2.256,0	2.541,0
3	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	672,6	484,1	472,8	566,2	558,9
4	Pertambangan & Penggalian Lainnya/Other Mining & Quarrying	2.064,3	1.882,9	1.803,0	1.889,4	1.972,7
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6.296,6	6.496,6	6.419,3	6.339,6	6.938,7
1	Industri Batu bara & Pengilangan Migas/Mfg. of Coal & Refined Petroleum Products	1.031,2	1.071,4	1.153,2	1.176,2	1.190,5
2	Industri Makanan & Minuman/Mfg. of Food Products & Beverages	2.018,8	2.259,7	2.410,2	2.452,4	2.359,5
3	Industri Pengolahan Tembakau/Mfg. of Tobacco Products	33,5	29,8	24,2	25,0	23,4
4	Industri Tekstil & Pakaian Jadi/Mfg. of Textiles & Wearing Apparel	10,4	10,9	13,3	14,8	13,1
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit & Atas Kulit/Mfg. of Leather & Related Products	7,1	6,8	7,7	6,7	5,4
6	Industri Kayu, Brgsdkt Kayu & Gabus & Brg Anyaman dr Bambu, Rotan & Sejenisnya/Mfg. of Wood & Wood Products of Wood & Cork, & Mats of Straw & Plaiting Materials	39,0	44,0	45,0	54,8	57,1
7	Industri Kertas & Barang dari Kertas; Percetakan & Reproduksi Media Rekam/Mfg. of Paper & Paper Products, Printing & Reproduction of Records or Media	76,5	78,4	85,3	93,6	85,0
8	Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional/Mfg. of Chemicals & Pharmaceuticals & Botanical Products	2.298,3	1.837,8	2.051,2	1.902,9	1.739,9
9	Industri Karet, Barang dari Karet & Resin/Mfg. of Rubber, Rubber Products & Plastics Products	138,0	131,1	139,8	157,0	163,4
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Mfg. of Other Non-Metallic Mineral Products	171,8	172,0	160,0	168,3	167,0
11	Industri Logam Dasar/nt. of Basic Metals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; & Peralatan Listrik/Mfg. of Fabricated Metal Products, Computer, & Optics Products, and/or Electrical Equipment	26,9	27,0	25,7	25,0	20,7
13	Industri Mesin & Peralengkapan/Mfg. of Machinery & Equipment	40,0	39,3	37,7	36,5	32,1
14	Industri Alat Angkut/Mfg. of Transport Equipment	23,5	24,2	25,6	25,5	19,2
15	Industri Furnitur/Mfg. of Furniture	175,8	162,7	167,6	174,7	157,0
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Perbaikan & Pemangnan Mesin & Peralatan/Other Manufacturing, Repair & Installation of Machinery & Equipment	5,3	5,9	5,9	6,3	5,5
D	Pengadaan Listrik & Gas/Electricity & Gas	176,0	184,0	197,7	211,5	217,4
1	Konsumsi Listrik/Electricity	131,5	135,4	145,3	155,8	169,1
2	Pengadaan Gas & Produksi Es/Mfg. of Gas & Production of Ice	44,1	47,5	51,5	55,6	48,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	37,1	38,8	41,8	51,6	50,1
F	Konstruksi/Construction	12.140,4	11.631,1	11.949,5	12.566,6	13.904,0
14	Pertdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles	18.313,0	18.982,4	19.799,3	20.324,5	19.238,7
1	Pertdagangan Mobil, Sepeda Motor & Reparasinya/Wholesale & Retail Trade & Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1.834,4	1.751,2	1.910,0	1.929,7	1.848,6
2	Pertdagangan Besar & Eceran; Bukan Mobil & Sepeda Motor/Wholesale Trade & Retail Trade Except of Motor Vehicles & Motorcycles	16.478,6	17.211,2	17.820,4	18.394,8	17.390,1
H	Transportasi & Pergudangan/Transportation & Storage	8.885,4	9.325,5	9.577,8	9.861,3	7.956,7
1	Angkutan Rel/Railways Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Angkutan Darat/Land Transport	7.732,9	8.046,5	8.218,7	8.637,1	6.422,6
3	Angkutan Laut/Sea Transport	184,1	184,6	204,8	223,5	200,2
4	Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan/River, Lake, & Ferry Transport	9,5	10,1	11,7	12,4	6,1
5	Angkutan Udara/Air Transport	895,1	1.010,4	1.059,9	899,9	339,3
6	Pengudangan & Jasa Penunjang Angkutan; Pos & Kurir/Warehousing & Support Services for Transportation, Postal & Courier	72,8	76,8	82,6	68,5	89,5
I	Pernyediaan Akomodasi & Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	1.388,2	1.544,9	1.672,9	1.785,4	1.649,2
1	Pernyediaan Akomodasi/Accommodation	157,9	171,9	171,9	165,5	106,3
2	Pernyediaan Makan Minum/Food & Beverage Service Activities	1.230,3	1.363,5	1.501,1	1.619,9	1.542,9
J	Informasi & Komunikasi/Information & Communication	4.191,6	4.305,4	4.461,2	4.632,6	5.187,4
K	Jasa Keuangan & Asuransi/Financial & Insurance Activities	1.974,7	2.063,2	2.081,2	2.343,0	2.356,0
1	Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	1.860,1	1.944,4	1.952,9	2.207,5	2.219,7
2	Asuransi & Dana Pensiun/Insurance & Pension Fund	38,3	41,9	45,9	50,3	51,7
3	Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	75,4	75,1	81,5	84,3	83,7
4	Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
L	Real Estate/Real Estate Activities	4.565,7	4.860,9	4.566,6	5.311,0	5.445,7
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	735,5	763,8	820,7	865,5	840,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	9.950,0	10.807,8	11.486,2	11.851,1	11.459,0
P	Jasa Pendidikan/Education	2.758,0	3.003,1	3.248,1	3.529,0	3.651,6
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial/Human Health & Social Work Activities	3.218,1	3.509,1	3.712,3	3.991,6	4.170,4
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	1.543,0	1.671,4	1.759,4	1.886,8	1.914,5
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		116.374,3	121.261,0	126.824,4	132.074,3	131.885,0
GR Tans Masuk/GRDP Without Oil & Gas		111.087,8	115.658,4	120.848,4	125.968,9	124.975,8

Lampiran 10 PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

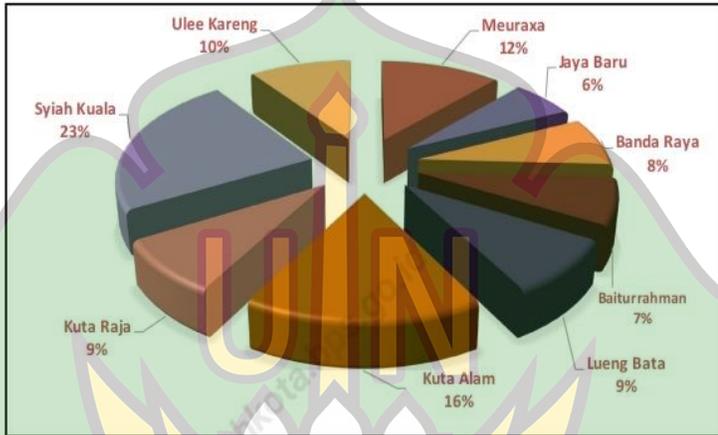
No	Kategori Lapangan Usaha	PDRB ACEH		PDRB KOTA Banda Aceh		Keterangan	Kuadran
		Rata ² Pertumbuhan	Rata ² Kontribusi	Rata ² Pertumbuhan	Rata ² Kontribusi		
		(%)	(%)	(%)	(%)		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,04	28%	0,07	1%	Sektor Potensial atau Masih dapat Berkembang	3
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,03	7%	0	0%	Sektor Relatif Tertinggal	4
3.	Industri Pengolahan	-0,01	5%	0,03	2%	sektor potensial atau Masih dapat Berkembang	3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,2%	0,09	0,4%	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,03%	0,10	0,10%	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
6.	Konstruksi	0,05	10%	0,04	8%	sektor Maju Tapi Tertekan	2
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,02	15%	0,01	21%	Sektor Maju Tapi Tertekan	2
8.	Transportasi dan Pergudangan	-0,04	7%	-0,06	12%	Sektor Potensial atau masih dapat berkembang	3
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	0,054	1%	0,050	3%	Sektor Maju Tapi Tertekan	2
10.	Informasi dan Komunikasi	0,05	4%	0,03	8%	Sektor Maju Tapi Tertekan	2
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,07	2%	0,05	3%	Sektor Maju Tapi Tertekan	2
12.	Real Estat	0,05	4%	0,08	7%	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
13.	Jasa Perusahaan	0,042	1%	0,041	2%	Sektor Potensial atau Masih dapat Berkembang	3
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,049	9%	0,052	21%	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
15.	Jasa Pendidikan	0,08	3%	0,09	6%	Sektor maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	3%	0,08	6%	sektor maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
17.	Jasa Lainnya	0,06	1%	0,07	6%	Sektor Maju dan Tumbuh dengan Pesat	1
18.	Total PDRB	0,03	100%	0,03	100%		

Lampiran 11 Hasil Analisis Tipologi Klassen

ANALISIS SHIFT-SHARE						
rij	r _{in}	r _n	Nij	Mij	Cij	Dij
0,22	0,38	0,152543	4757,252157	46386,68746	-19785,16726	31358,77235
0,13	0,00	0,152543	0	0	0	0
-0,06	0,17	0,152543	987,6670774	44285,47746	-61066,3229	-15793,17837
0,36	0,55	0,152543	24,31527826	24433,20746	-8276,634028	16180,88871
0,48	0,57	0,152543	5,171191549	6448,747457	-1016,547788	5437,370861
0,29	0,05	0,152543	1643,905014	49809,34746	239870,9718	291324,2243
0,08	0,05	0,152543	2708,255218	127128,5475	103954,5777	233791,3804
-0,21	-0,29	0,152543	1362,021685	-524900,3525	146098,6456	-377439,6852
0,29	0,25	0,152543	195,3612099	93427,14746	13398,33809	107020,8468
0,27	0,18	0,152543	622,4497675	194369,4475	102500,2476	297492,1448
0,38	0,30	0,152543	260,4511048	95223,94746	26442,95017	121927,3487
0,30	0,48	0,152543	637,6582571	366303,4475	-135735,2641	231205,8416
0,22	0,21	0,152543	104,7204424	61104,44746	2910,772644	64119,94054
0,26	0,28	0,152543	1382,965773	701376,6475	-40297,24461	662462,3686
0,47	0,51	0,152543	379,4342731	359412,7475	-27611,26641	332180,9153
1,88	0,47	0,152543	221,2019134	208463,6475	628325,8802	837010,7296
0,32	0,40	0,152543	221,2019134	88063,34746	-16702,37599	71582,17338
0,17	0,15	0,152543	Rp 17.186	Rp1.941.127,88	Rp 195.761	Rp 2.154.075

Lampiran 12 Analisis Shift-Share

Gambar 1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2020
Figures 1.1 Area of Subdistrict (%), 2020



Sumber/Source: Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022/Based on Middle Term Regional Development Planning 2017-2022

Lampiran 13 Luas Daerah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Ribu Rupiah),
2018-2019

Uraian	2018	2019
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 135 914 599,51	1 214 903 827,53
1. Pendapatan Asli Daerah	246 272 150,48	235 113 513,53
2. Dana Perimbangan	748 380 228,41	752 796 089,17
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	141 262 220,62	226 994 224,81
BELANJA DAERAH	1 173 868 935,01	1 230 051 494,14
1. Belanja Tak Langsung	584 858 967,84	593 324 830,08
2. Belanja Langsung	589 009 967,17	636 726 664,05
PEMBIAYAAN	67 470 315 576	
1. Penerimaan Pembiayaan	81 706 315 576	
2. Pengeluaran Pembiayaan	14 236 000 000	
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	29 559 724 417	

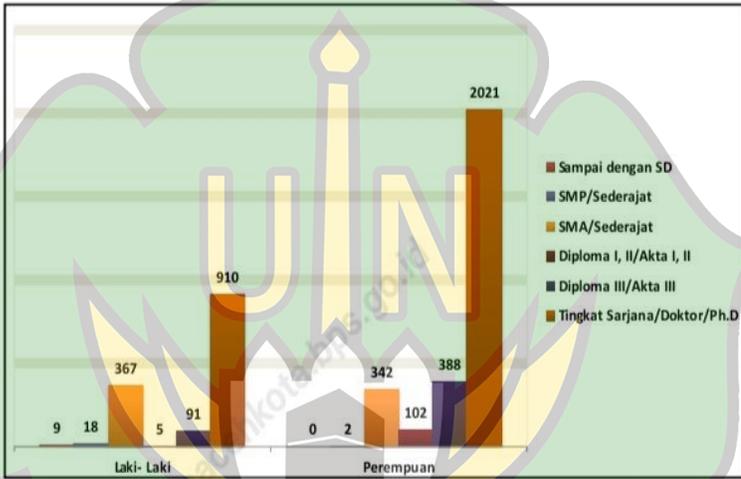
Lampiran 14 Realisasi Keuangan Kota Banda Aceh (Ribu Rupiah) 2018-
2019

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Gambar 2.1
Figures

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2020
Number of Civil Servants by Sex and Educational Level, 2020

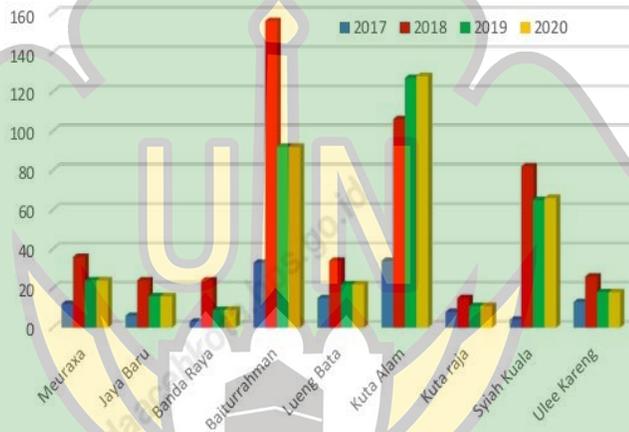


Sumber/Source : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh/ Civil Service and Human Development Board of Banda Aceh Municipality

Lampiran 15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan, 2020

AR - R A N I R Y

Gambar 9.1 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017–2020
Figures 9.1 Number of Active Cooperative by Subdistrict in Banda Aceh Municipality, 2017–2020



Sumber/Source: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh / Small and Middle Business Cooperative Service and Trading of Banda Aceh Municipality

Lampiran 16 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2017-2020

Lanjutan Tabel/Continued Table 2.2.5

Jumlah Number	Nama Dinas/Kantor/Badan Organization Name
(1)	(2)
6	BADAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota B. Aceh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota B. Aceh Badan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kota B. Aceh
1	KANTOR Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
2	PARA DIREKTUR RSU Meuraxa Kota Banda Aceh PDAM Kota Banda Aceh
9	KECAMATAN Kecamatan Kuta Alam Kecamatan Sylvania Kuala Kecamatan Baiturrahman Kecamatan Meuraxa Kecamatan Jaya Baru Kecamatan Banda Raya Kecamatan Lueng Bata Kecamatan Ulee Kareng Kecamatan Kuta Raja
3	LEMBAGA KEISTIMEWAAN MAA Banda Aceh MPD Baitul Mal Kota Banda Aceh
4	SEKRETARIAT KEISTIMEWAAN Kepala Sekretariat MPD Kota BA Kepala Sekretariat MAA Kota Banda Aceh Sekretariat Baitul Mal Kota BA Kepala Sekretariat MPU Kota BA

Sumber/Source: Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh / Administration Regional Secretariat of Banda Aceh Municipality

Lampiran 17 Nama-nama Dinas/Kantor/Badan di Kota Banda Aceh

Gambar 7.1 Banyaknya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Banda Aceh, 2020
Figures 7.1 *Number of Domestic and Foreign Tourists by Months in Banda Aceh Municipality, 2020*



Sumber/Source: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh/ Tourism Service of Banda Aceh Municipality

Lampira 18 Banyaknya Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kota Banda Aceh, 2020

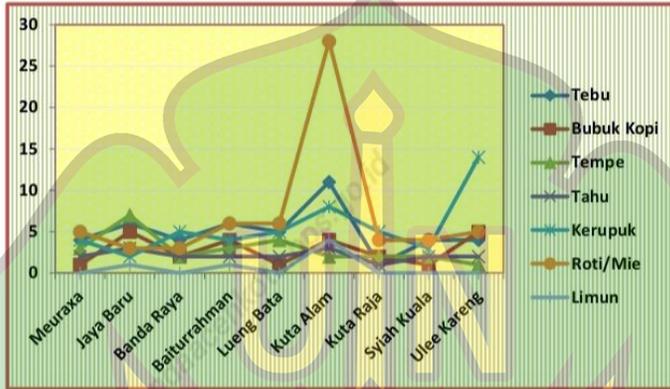
Gambar 12.1 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh, 2016-2020
Figures **12.1** Gross Domestic Product at current prices and rate of economic growth in Banda Aceh, 2016-2020



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh/BPS-Statistics of Aceh Province

Gambar 6.2
Figures

Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri di Kota Banda Aceh, 2020
Number of Food and Beverage Industry by Type in Banda Aceh Municipality, 2020



Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (Bidang Perindustrian)/ Employment Service of Banda Aceh Municipality

Lampiran 20 Jumlah Industri Makanan dan Minuman Menurut Jenis Industri di Kota Banda Aceh, 2020